



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

p-ISSN 2986-0849

BULETIN STATISTIK

ANTI PENCUCIAN UANG
DAN PENCEGAHAN
PENDANAAN TERORISME
(APUPPT)
SERTA
PENDANAAN PROLIFERASASI
SENJATA PEMUSNAH
MASSAL (PPSPM)

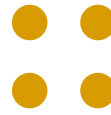
Januari 2026

Vol. 14 No. 1



Ringkasan Eksekutif

Januari 2026



Laporan yang diterima oleh PPATK

4.100.235

▲ 2,3%
m-to-m

▲ 22,2%
y-on-y



3.696.882
LTKL

m-on-m 1,5%

y-on-y 25,4%



379.804
LTKT

13,9%

5,0%



11.522
LTKM

-21,2%

-18,5%



9.508
LTPBJ

-30,0%

16,7%



835
LPUT

5,6%

-68,8%



1.684
LPT

49,3%

83,6%

HASIL ANALISIS (HA)

▼ -30,8%
m-to-m

83

▲ 2,5%
y-on-y

▼ -45,9%
m-to-m

▼ -13,0%
y-on-y

HA Proaktif

20

HA Inquiry

63

▼ -24,1%
m-to-m

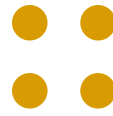
▲ 8,6%
y-on-y

41 Informasi

4 HA Terkait Tindak Pidana Pendanaan Terorisme

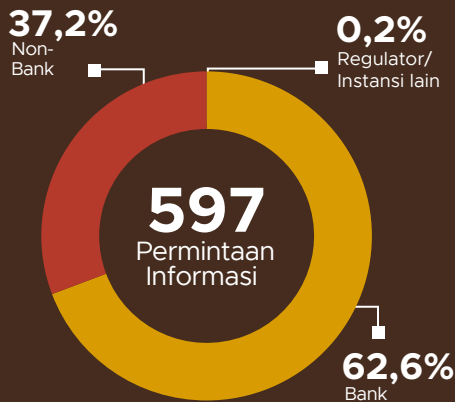
0 Hasil Pemeriksaan (HP)

Ringkasan Eksekutif

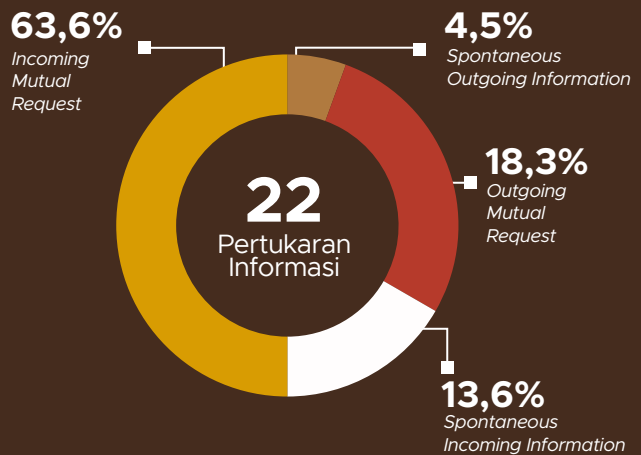


Januari 2026

Informasi lainnya terkait pelaksanaan tugas PPATK



Untuk keperluan analisis, sepanjang bulan Januari 2026, PPATK melakukan 597 permintaan informasi dengan tujuan terbanyak kepada Bank (374 informasi/ 62,6%)



Dari 22 pertukaran informasi yang dilakukan PPATK dengan FIU lain, mayoritas jenis informasi yang dipertukarkan adalah *Incoming Mutual Request*

13 Keterangan Ahli

Pada Januari 2026, terdapat 13 pemberian keterangan ahli dengan pemberian terbanyak kepada Kejaksaan (7 keterangan/53,8%)

25 Pengaduan Masyarakat

Pengaduan yang diterima pada Januari 2026, berasal dari 18 pengaduan individu dan 7 pengaduan lembaga

2 Diklat APUPPT

Terdapat 2 kegiatan pelatihan APUPPT pada bulan Januari 2026

2 Dokumen Kerja Sama

Terdapat 2 penandatanganan dokumen kerja sama antara PPATK dengan Instansi/Lembaga pada Januari 2026

1 Audit

Terdapat 1 kegiatan audit yang dilakukan pada bulan Januari 2026. 1 kegiatan audit kepada PBJ

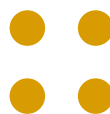
46.170 Pihak Pelapor

Terdapat 46.170 pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada goAML per Januari 2026

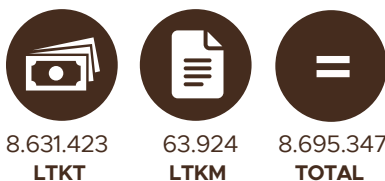
PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

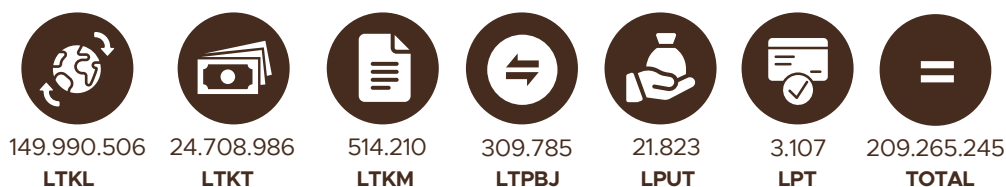
Ringkasan Eksekutif



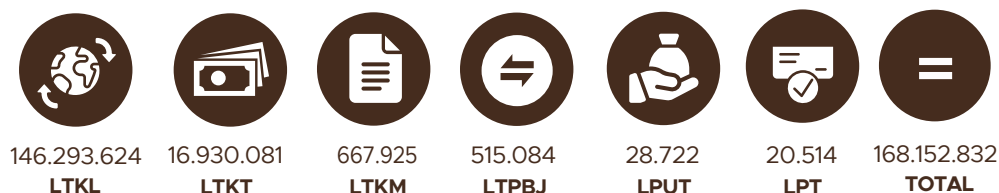
Periode 2003 s.d. 2010



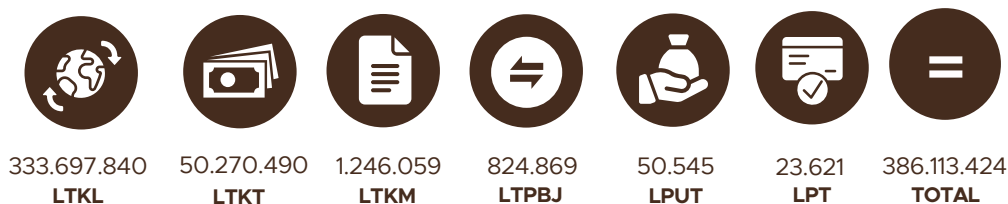
Periode 2010 s.d. Jan 2021



Periode Feb 2021 s.d. Jan 2026



Periode 2003 s.d. Jan 2026





Kata Pengantar

**BULETIN STATISTIK
ANTI PENCUCIAN UANG DAN
PENCEGAHAN PENDANAAN
TERORISME SERTA PENDANAAN
PROLIFERASI SENJATA PEMUSNAH
MASSAL**

Januari 2026

Statistics AML/CFT January 2026

ISSN: 2986-0849

Ukuran Buku/Book Size :
B5 (17.5 x 25.5 cm)

Jumlah Halaman/Number of Pages :
ix + 84 halaman/pages

Naskah/Manuscript:
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi
Keuangan (PPATK)/ Indonesian
Financial Transaction Reports and
Analysis Center (INTRAC)

Penyunting/Editor :
Direktorat Pelaporan/Directorate of
Reporting

Desain Sampul/Cover Design :
Direktorat Pelaporan/Directorate of
Reporting

Diterbitkan oleh/Published by:
© Pusat Pelaporan dan Analisis
Transaksi Keuangan (PPATK)/
Indonesian Financial Transaction
Reports and Analysis Center (INTRAC)

Sumber Ilustrasi/Graphics by :
freepik.com, flaticon.com, vecteezy.com

Dilarang mengumumkan,
mendistribusikan, mengomunikasikan,
dan/atau menggandakan sebagian
atau seluruh isi buku ini untuk tujuan
komersial tanpa izin tertulis dari PPATK

*Prohibited to announce, distribute,
communicate, and/or copy part or all
of this book for commercial purpose
without permission from Indonesian
Financial Transaction Reports and
Analysis Center (INTRAC)*

Buletin Statistik APUPPT disusun secara periodik untuk menyampaikan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi PPATK dalam upaya mencegah dan memberantas Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia sebagaimana tercantum dalam Undang- Undang Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (selanjutnya disebut UU PP TPPU) serta Undang-Undang Nomor 9 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (selanjutnya disebut UU PP TPPT).

Dalam buletin ini, statistik yang dihimpun mencakup:

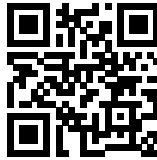
1. Perkembangan aktivitas pelaporan oleh Pihak Pelapor (Penyedia Jasa Keuangan/PJK, Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain/PBJ, dan Profesi) serta Ditjen Bea Cukai; 2. Penyampaian Hasil Analisis dan Hasil Pemeriksaan kepada Aparat Penegak Hukum serta; 3. Informasi lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas PPATK. Hingga bulan Januari 2026, PPATK telah menyampaikan Hasil Analisis (selanjutnya disebut HA) kepada Penyidik sebanyak 83 HA dengan 20 HA Proaktif dan 63 HA Inquiry, sementara untuk dugaan tindak pidana yang paling dominan adalah Tindak Pidana Penipuan (23 HA/27,7%) serta 0 Hasil Pemeriksaan (selanjutnya disebut HP). Sementara itu, selama bulan Januari 2026 pula, jumlah laporan yang diterima PPATK sebanyak 4.100.235 laporan dan mengalami peningkatan dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 2,3%. Peningkatan tertinggi (dibandingkan dengan bulan Desember 2025) terjadi pada penerimaan LTKT yaitu sebesar 13,9% dan LTKL sebesar 1,5%

Jakarta, Februari 2026
Kepala PPATK

IVAN YUSTIAVANDANA



*Dapatkan dataset Buletin Statistik
APUPPT PPSM ini pada:*



Scan Me

Daftar Isi

Vol. 14, No.1, 2026

iii Ringkasan
Eksekutif
vii Kata Pengantar
ix Daftar Isi

1

LAPORAN TRANSAKSI

- 1 Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM)
- 15 Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT)
- 23 Laporan Pembawaan Uang Tunai (LPUT)
- 27 Laporan Transaksi Penyedia Barang dan Jasa (LTPBJ)
- 31 Laporan Transfer Dana Dari/Ke Luar Negeri (LTKL)
- 37 Laporan Penundaan Transaksi (LPT)

39

ANALISIS DAN PEMERIKSAAN

- 39 Hasil Analisis (HA)
- 45 Hasil Pemeriksaan (HP)
- 49 Informasi
- 55 Permintaan Informasi Kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait
- 59 Pertukaran Informasi Antar FIU

63

LAIN-LAIN

- 63 Putusan Pengadilan Terkait TPPU/TPPT
- 67 Keterangan Ahli
- 69 Pihak Pelapor GoAML
- 73 Audit Kepatuhan
- 77 Dokumen Kerja Sama
- 79 Kontribusi Indonesia Sebagai Anggota FATF
- 83 Pendidikan & Pelatihan APUPPT
- 87 Pengaduan Masyarakat

TIM PENYUSUN

Pengarah

Fithriadi

Penanggung Jawab

Patrick Irawan

Penyunting

Yudi Aditia; Ratih Putri Pertiwi

Pengolah Data dan Penulis Naskah

Novie Eriska Aritonang; Ari Utami; Yoyong Octariyandy; Maria Sasanda

Kontributor Data

Direktorat Pelaporan;

Direktorat Analisis dan Pemeriksaan I, II, III;

Direktorat Hukum dan Regulasi;

Direktorat Pengawasan Kepatuhan PJK;

Direktorat Pengawasan Kepatuhan PBJP;

Direktorat Strategi dan Kerja Sama Dalam Negeri;

Direktorat Strategi dan Kerja Sama Internasional;

Pusat Pendidikan dan Pelatihan APUPPT;

Pusat Pemberdayaan Kemitraan APUPPT



PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI



LTKM

Laporan Transaksi Keuangan Mencurigikan Januari 2026

Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigikan dimulai sejak Januari Tahun 2003

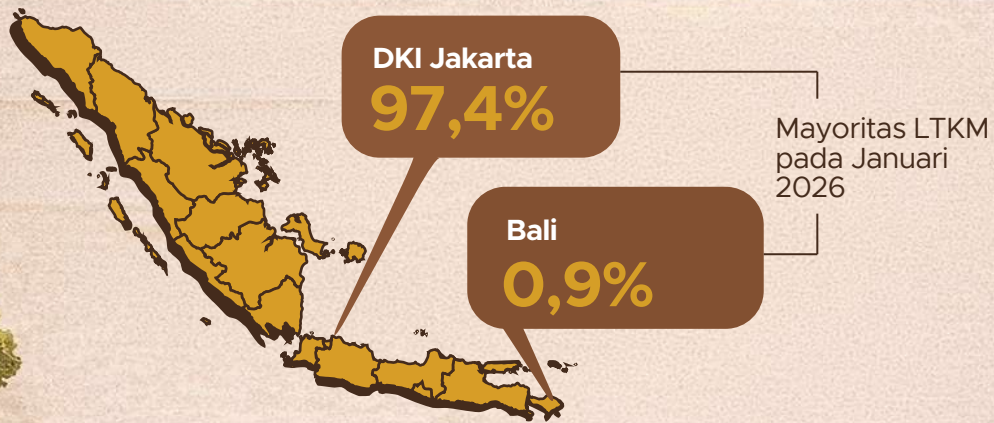
Jumlah LTKM yang disampaikan Pihak Pelapor kepada PPAK

11.522 LTKM

Dilaporkan oleh Penyedia Jasa Keuangan (PJK), Penyedia Barang dan/atau Jasa (PBJ) serta Profesi melalui sistem goAML

Rata-rata penerimaan LTKM

576 laporan/hari
(1 bulan = 20 hari)



Pelaporan LTKM bulan ini

∨ -21,2%

Dibandingkan bulan Desember 2025 (*m-to-m*)

Pelaporan LTKM bulan ini

∨ -18,5%

Dibandingkan bulan Januari 2025 (*y-on-y*)

Indikasi Tindak Pidana mayoritas pada Januari 2026

Perjudian
33,0%



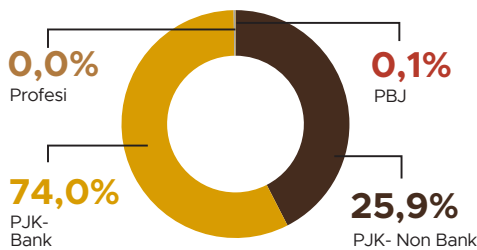
Tabel 1. Jumlah LTKM yang dikirimkan oleh Pihak Pelapor per Bulan Berdasarkan Klasifikasinya*)

Laporan	2025												2026
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
LTKM - Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	13.228	13.125	16.179	10.538	13.137	12.905	19.888	15.853	13.477	14.366	10.989	13.710	10.399
LTKM - Terkait Transaksi Pendanaan Terorisme	3	3	6	7	7	3	7	4	23	3	5	2	9
LTKM - Atas Permintaan PPKATK	252	272	241	413	248	197	2.573	207	1.460	597	311	333	114
LTKM - Terkait Aktivitas Pendanaan Terorisme	2	-	2	-	-	-	1	-	4	3	1	0	6
Laporan Aktivitas Mencurigakan - Pemutusan Usaha	658	869	965	1.060	661	498	1.292	486	610	552	463	582	994

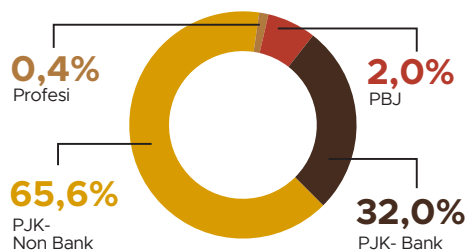
Catatan:

*) Uraian LTKM disesuaikan dengan klasifikasi yang terdapat pada GoAML menurut Pasal 34 Ayat (1) Peraturan PPKATK No 1 Tahun 2021

Grafik 1. Distribusi Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM Tahun 2026 (s.d Januari 2026)



Grafik 2. Distribusi Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor Tahun 2026 (s.d Januari 2026)



UU No. 8 Tahun 2010
Pasal (1) Ayat 5

Transaksi Keuangan Mencurigakan adalah:

- Transaksi Keuangan yang menyimpang dari profil, karakteristik, atau kebiasaan pola Transaksi dari Pengguna Jasa yang bersangkutan;
- Transaksi Keuangan oleh Pengguna Jasa yang patut diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari pelaporan Transaksi yang bersangkutan yang wajib dilakukan oleh Pihak Pelapor sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini;
- Transaksi Keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan dengan menggunakan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana; atau
- Transaksi Keuangan yang diminta oleh PPKATK untuk dilaporkan oleh Pihak Pelapor karena melibatkan Harta Kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.

Tabel 2. Jumlah Kumulatif LTKM dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri^(*)

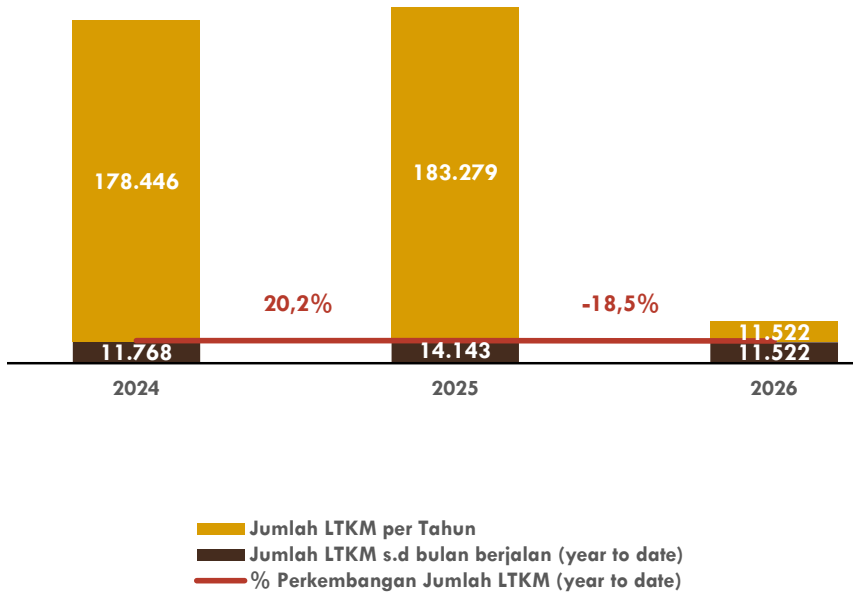
Kelompok Industri ⁽¹⁾	Laporan					Pihak Pelapor 2026 (s.d Jan 2026) (7)
	2024		2025		2026	
	Jan	Total	Jan	Total	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PJK Bank	6.031	98.896	9.621	127.520	8.527	80
Bank Umum	6.012	98.670	9.593	127.313	8.509	73
Bank Asing	129	2.564	71	1.163	79	7
Bank Campuran	26	383	8	162	4	2
Bank Milik Negara	1.206	14.822	1.213	18.059	1.439	4
Bank Pembangunan Daerah	142	2.170	128	2.332	189	16
Bank Swasta	4.509	78.731	8.173	105.597	6.798	44
Bank Perkreditan Rakyat	19	226	28	207	18	7
PJK Non Bank	5.729	79.303	4.494	55.468	2.983	164
Perusahaan Pembiayaan	270	4.745	305	4.056	91	20
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	198	3.742	384	5.037	394	18
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	12	81	6	48	4	2
Perusahaan Efek	105	2.754	240	3.380	264	20
Manajer Investasi	78	1.145	96	1.570	123	3
Kustodian	-	7	-	19	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	499	8.242	1.293	9.246	597	64
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	4.051	38.555	702	12.265	393	5
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	10	-	20	-	-
Pegadaian	11	110	8	344	20	2
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	24	9.828	929	11.508	442	11
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	382	7.230	527	6.136	628	15
Perusahaan Modal Ventura	-	2	-	8	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	2	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	9	1.574	4	1.722	-	-
Penyelenggara layanan dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	5	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	1	-	-	-	-

Kelompok Industri ^{*)}	Laporan					Pihak Pelapor 2026 (s.d Jan 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan	Total	Jan	Total	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pedagang Aset Kripto	90	1.277	-	102	27	4
PBJ	6	205	26	241	11	5
Profesi	2	42	2	50	1	1
Total	11.768	178.446	14.143	183.279	11.522	250

Catatan:

*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Grafik 3. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTKM dalam 2 Tahun Terakhir s.d Januari 2026



Tabel 3. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri ^{*)}	2025						
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
PJK Bank	9.621	10.202	9.835	8.484	10.512	9.672	15.642
Bank Umum	9.593	10.191	9.823	8.478	10.494	9.654	15.628
Bank Asing	71	135	60	42	36	108	78
Bank Campuran	8	22	19	17	11	11	15
Bank Milik Negara	1.213	919	1.076	1.569	1.532	1.420	1.890
Bank Pembangunan Daerah	128	223	209	115	129	290	369
Bank Swasta	8.173	8.892	8.459	6.735	8.786	7.825	13.276
Bank Perkreditan Rakyat	28	11	12	6	18	18	14
PJK Non Bank	4.494	4.045	7.540	3.515	3.498	3.920	8.081
Perusahaan Pembiayaan	305	210	333	389	228	461	499
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	384	390	420	330	331	392	563
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	6	2	10	3	1	10	8
Perusahaan Efek	240	201	373	245	254	414	487
Manajer Investasi	96	91	61	57	74	110	176
Kustodian	-	-	-	5	3	-	1
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	1.293	903	655	768	610	607	744
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	702	876	4.281	794	1.074	723	482
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	-	1	1	-	3	-
Pegadaian	8	17	11	24	22	24	57
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	929	974	937	221	315	571	4.236
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	527	352	434	527	501	574	664
Perusahaan Modal Ventura	-	1	2	-	-	4	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	2	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	4	13	21	150	83	25	161
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	-	13	1	1	2	2	3
PBJ	26	21	11	12	43	6	37
Profesi	2	1	7	5	-	5	1
Total	14.143	14.269	17.393	12.016	14.053	13.603	23.761

Catatan:

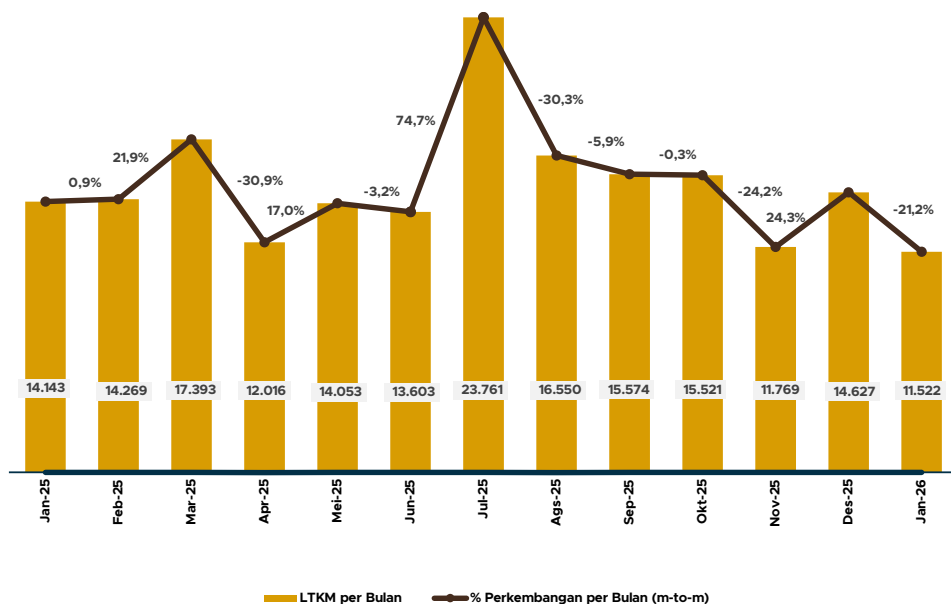
*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Kelompok Industri ^{*)}	2025					2026
	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	9.984	11.666	12.136	8.747	11.019	8.527
Bank Umum	9.958	11.654	12.115	8.728	10.997	8.509
Bank Asing	69	144	152	185	83	79
Bank Campuran	7	16	15	12	9	4
Bank Milik Negara	1.430	1.673	1.600	1.652	2.085	1.439
Bank Pembangunan Daerah	151	232	172	130	184	189
Bank Swasta	8.301	9.589	10.176	6.749	8.636	6.798
Bank Perkreditan Rakyat	26	12	21	19	22	18
PJK Non Bank	6.551	3.880	3.370	2.993	3.581	2.983
Perusahaan Pembiayaan	1.049	149	152	187	94	91
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	440	365	410	421	591	394
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	4	-	2	1	1	4
Perusahaan Efek	208	172	325	273	188	264
Manajer Investasi	180	164	264	153	144	123
Kustodian	1	1	6	1	1	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	768	1.027	686	615	570	597
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1.034	1.015	291	331	662	393
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	13	-	2	-	-
Pegadaian	37	53	22	39	30	20
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	1.110	516	587	456	656	442
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	465	375	613	500	604	628
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	1	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	1.246	9	5	4	1	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	3	-	-	2	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	6	21	7	7	39	27
PBJ	13	19	11	25	17	11
Profesi	2	9	4	4	10	1
Total	16.550	15.574	15.521	11.769	14.627	11.522

Catatan:

*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Grafik 4. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKM per Bulan Dalam 1 Tahun Terakhir



Tabel 4. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKM Per Kelompok Industri^(*)

Kelompok Industri ^(*)	Transaksi				
	2024		2025		2026
	Jan	Total	Jan	Total	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PJK Bank	516.746	6.721.611	523.101	6.319.983	719.117
Bank Umum	516.707	6.721.263	523.065	6.319.697	719.091
Bank Asing	2.471	16.035	1.315	9.157	463
Bank Campuran	916	4.831	726	2.413	27
Bank Milik Negara	19.315	767.415	28.347	632.435	13.546
Bank Pembangunan Daerah	3.282	83.210	4.025	78.542	1.149
Bank Swasta	490.723	5.849.772	488.652	5.597.150	703.906
Bank Perkreditan Rakyat	39	348	36	286	26
PJK Non Bank	495.787	29.867.675	221.080	7.701.705	91.028
Perusahaan Pembiayaan	298	36.946	339	39.590	274
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	506	9.510	1.100	11.771	955
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	25	280	44	424	28
Perusahaan Efek	128	12.335	364	4.248	315
Manajer Investasi	10	319	53	384	13
Kustodian	-	13	-	80	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	801	12.790	1.728	15.960	1.106

Kelompok Industri*)	Transaksi				
	2024		2025		2026
	Jan	Total	Jan	Total	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	445.335	28.551.233	190.340	6.948.349	43.957
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	-	12	-	30	-
Pegadaian	11	110	8	344	20
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	1.254	571.889	19.026	494.674	35.991
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	6.977	422.773	8.064	170.812	8.218
Perusahaan Modal Ventura	-	1	-	5	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	2	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	9	11.935	14	13.581	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	5	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	1	1	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	40.432	237.528	-	1.446	151
PBJ	7	214	26	291	11
Pofesi	1	37	1	38	1
Total	1.012.541	36.589.537	744.208	14.022.017	810.157

Catatan:

*) Terdapat penyesuaian kelompok industri sesuai dengan kategorisasi yang diaplikasikan dalam sistem goAML (mulai Februari 2021)

Tabel 5. Jumlah Indikasi Tindak Pidana Asal per Bulan pada LTKM

Tindak Pidana Asal ^{*)}	2024	2025	2025					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Cukai ^{**)}	60	39	5	-	2	2	5	3
Di Bidang Kehutanan	87	98	3	3	2	1	16	9
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	33	38	6	3	2	6	4	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	561	558	41	30	32	37	34	49
Di Bidang Pasar Modal	1.248	2.818	272	315	330	290	253	495
Di Bidang Perasuransian	1.526	1.767	192	171	254	192	166	175
Di Bidang Perbankan	4.952	4.861	401	438	781	879	583	465
Di Bidang Perpajakan	7.561	5.968	458	437	393	374	358	361
Kepabeanaan ^{**)}	146	66	2	1	3	3	13	2
Korupsi	6.795	7.564	553	611	866	671	659	824
Narkotika	3.560	3.742	276	398	287	228	295	347
Pemalsuan Uang	12	28	55	1	1	3	-	1
Penculikan	3	3	-	1	2	2	-	-
Pencurian	105	108	11	27	48	39	36	13
Penggelapan	42.363	12.863	1.047	1.023	880	146	150	222
Penipuan	24.222	33.357	2.251	2.640	2.448	2.401	2.429	2.613
Penyelundupan Migran	9	17	-	-	-	1	-	2
Penyelundupan Tenaga Kerja	20	21	-	1	-	-	-	-
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	1.592	1.341	103	135	104	177	104	88
Perdagangan Orang	482	186	5	4	14	2	2	7
Perdagangan Senjata Gelap	12	11	-	-	1	2	-	-
Perjudian	24.850	89.468	6.570	6.574	9.718	5.320	7.708	6.816
Prostitusi	36	246	6	1	6	1	1	4
Psikotropika	19	13	2	-	1	1	1	3
Terorisme	394	272	9	19	8	12	16	5
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	14.661	17.767	2.301	1.869	1.738	1.701	1.637	1.864
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	135.309	183.220	14.569	14.702	17.921	12.491	14.470	14.368

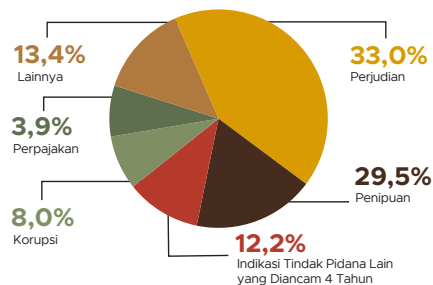
Catatan:

*) Terdapat penyesuaian jenis Tindak Pidana Asal setelah adanya implementasi GoAML

**) Tindak Pidana ini pada implementasi GRIPS dicantumkan sebagai Penyelundupan Barang dan mulai pada implementasi GoAML akan didefinisikan kembali menjadi TP Cukai dan TP Kepabeanaan.

Tindak Pidana Asal ^{*)}	2025						2026
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai ^{**)}	13	3	6	4	8	7	-
Di Bidang Kehutanan	7	8	10	6	31	31	33
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	2	3	1	9	2	-	1
Di Bidang Lingkungan Hidup	64	51	53	43	40	31	46
Di Bidang Pasar Modal	589	366	341	570	429	343	375
Di Bidang Perasuransian	272	205	143	178	195	216	122
Di Bidang Perbankan	502	407	418	480	384	422	342
Di Bidang Perpajakan	664	351	545	553	442	492	473
Kepabeanaan ^{**)}	-	-	2	6	2	10	12
Korupsi	2.300	881	902	779	887	1.012	970
Narkotika	530	356	285	280	304	341	161
Pemalsuan Uang	-	-	-	1	-	-	-
Penculikan	-	-	-	1	-	-	1
Pencurian	19	15	16	39	8	20	9
Penggelapan	506	183	206	268	317	358	360
Penipuan	5.150	2.748	3.243	3.155	2.909	3.775	3.593
Penyelundupan Migran	1	2	3	-	-	3	1
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	1	1	-	-	3	1
Penyelundupan Barang ^{**)}	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	136	94	71	150	92	129	110
Perdagangan Orang	10	9	12	7	37	18	14
Perdagangan Senjata Gelap	-	1	-	-	1	-	-
Perjudian	11.669	9.503	7.761	7.645	4.958	6.542	4.024
Prostitusi	20	29	2	7	2	4	3
Psikotropika	-	4	2	1	1	2	2
Terorisme	23	18	39	32	21	22	38
Indikasi Tindak pidana lain yang diancam pidana 4 tahun atau lebih	2.492	1.995	2.194	2.138	1.354	1.633	1.491
Tidak teridentifikasi	-	-	-	-	-	-	-
Total	24.969	17.233	16.256	16.352	12.424	15.414	12.182

Grafik 5. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulatif LTKM per Tindak Pidana Asal Tahun 2026 (s.d Januari 2026)

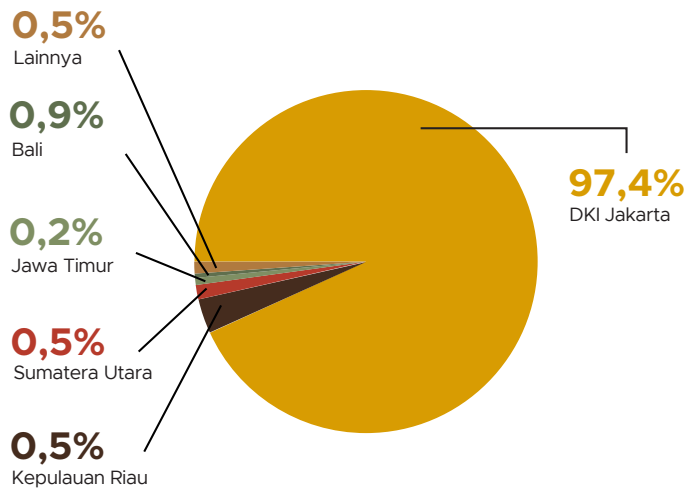


Tabel 6. Jumlah LTKM Pihak Pelapor per Provinsi Lokasi Kantor Cabang Pihak Pelapor per Bulan

Provinsi	2024	2025	2025					
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Aceh	22	25	-	1	1	2	-	2
Sumatera Utara	216	742	28	100	59	54	71	114
Sumatera Barat	27	43	3	2	2	-	1	2
Sumatera Selatan	41	51	9	5	14	9	17	15
Bengkulu	8	11	-	-	3	-	2	1
Jambi	38	69	5	6	4	4	4	-
Riau	8	8	-	1	-	1	8	1
Kepulauan Riau	1.491	1.635	58	31	18	20	41	12
Lampung	298	212	24	8	4	3	6	4
Kep Bangka Belitung	1	0	-	-	-	-	-	-
Banten	117	168	9	17	28	20	23	23
DKI Jakarta	126.653	174.061	13.893	13.981	17.095	11.776	13.751	13.171
Jawa Barat	352	493	48	57	72	91	71	124
Jawa Tengah	384	76	1	1	7	-	1	4
Jawa Timur	262	248	24	6	9	9	15	34
DI Yogyakarta	46	33	-	2	2	2	2	4
Bali	122	128	11	17	40	8	20	48
Nusa Tenggara Barat	10	24	3	1	2	-	-	3
Nusa Tenggara Timur	30	8	-	-	1	-	1	-
Maluku	3	3	1	-	-	-	-	-
Maluku Utara	2	7	-	1	-	-	-	-
Kalimantan Barat	53	90	3	5	2	4	7	25
Kalimantan Timur	14	17	4	14	4	5	2	-
Kalimantan Tengah	34	62	4	4	6	2	-	-
Kalimantan Selatan	65	52	6	-	5	2	3	-
Kalimantan Utara	0	0	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	5	6	1	1	2	1	-	1
Sulawesi Selatan	31	58	5	-	4	-	1	1
Sulawesi Tengah	9	2	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Tenggara	64	29	2	1	1	-	-	1
Sulawesi Barat	16	0	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	0	1	-	-	-	-	-	-
Papua	50	84	1	7	7	4	6	13
Papua Barat	0	0	-	-	-	-	-	-
Total	130.472	178.446	14.143	14.269	17.392	12.017	14.053	13.603

Provinsi	2025						2026
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	12	10	7	2	1	3	-
Sumatera Utara	144	36	82	20	38	52	68
Sumatera Barat	8	-	5	20	5	7	6
Sumatera Selatan	17	5	4	27	4	4	10
Bengkulu	-	-	-	-	-	10	-
Jambi	8	2	5	4	5	-	-
Riau	13	2	7	-	5	2	3
Kepulauan Riau	27	51	47	82	68	42	56
Lampung	-	19	6	7	11	17	12
Kep Bangka Belitung	-	-	-	-	-	-	-
Banten	26	14	8	8	4	1	5
DKI Jakarta	23.272	16.285	15.177	15.154	11.492	14.317	11.217
Jawa Barat	133	68	83	66	11	21	4
Jawa Tengah	11	-	2	5	4	4	-
Jawa Timur	17	7	24	59	31	32	19
DI Yogyakarta	1	2	5	2	3	-	1
Bali	42	33	58	36	38	52	105
Nusa Tenggara Barat	3	5	3	3	4	-	-
Nusa Tenggara Timur	-	-	6	-	2	-	-
Maluku	-	-	-	-	-	-	-
Maluku Utara	2	1	1	-	-	-	-
Kalimantan Barat	14	5	2	3	10	16	4
Kalimantan Timur	3	1	2	-	-	1	-
Kalimantan Tengah	5	3	2	5	6	27	4
Kalimantan Selatan	-	-	5	2	5	1	-
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-
Sulawesi Utara	1	-	1	5	1	-	-
Sulawesi Selatan	-	-	5	2	2	11	2
Sulawesi Tengah	1	-	1	3	-	-	-
Sulawesi Tenggara	1	1	13	6	17	5	4
Sulawesi Barat	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-
Papua	-	-	13	-	2	2	2
Papua Barat	-	-	-	-	-	-	-
Total	23.761	16.550	15.574	15.521	11.769	14.627	11.522

Grafik 6. Distribusi 5 Penerimaan Terbesar Kumulati LTKM per Provinsi Tahun 2026 (s.d Januari 2026)



PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

LTKT

Laporan Transaksi Keuangan Tunai Januari 2026

LTKT merupakan laporan atas transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan instrumen uang kertas dan/atau uang logam dengan jumlah paling sedikit Rp500.000.000 atau dengan uang asing yang nilainya setara.

Jumlah LTKT yang disampaikan Pihak Pelapor ke PPA TK

379.804

≈13,8%

Dibandingkan bulan Desember 2025 (*m-to-m*)

≈5,0%

Dibandingkan bulan Januari 2025 (*y-on-y*)

Jumlah Pelapor LTKT Tahun 2026 s.d bulan berjalan (Jan 2026)

415

Pihak Pelapor

294

Bank

121

Non Bank

204.885

LTKT Kas Masuk

174.919

LTKT Kas Keluar

BANK

ATM

Tabel 7. Jumlah Kumulatif LTKT dan Pihak Pelapor per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2026 (s.d Jan 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan	Total 2024	Jan	Total 2025	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
PJK Bank	370.973	3.648.756	359.071	3.520.358	376.650	294
Bank Umum	370.021	3.639.459	358.195	3.510.611	375.529	95
Bank Perkreditan Rakyat	952	9.297	876	9.747	1.121	199
PJK Non Bank	3.913	41.606	2.699	37.115	3.154	121
Perusahaan Pembiayaan	8	82	8	97	12	4
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	2.777	29.179	1.733	25.492	1.759	92
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	54	612	50	2.317	36	4
Pegadaian	785	8.624	205	4.123	902	8
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	289	3.109	703	5.086	445	13
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Total	374.886	3.690.362	361.770	3.557.473	379.804	415



UU No. 8 Tahun 2010

Pasal 1 Ayat 6

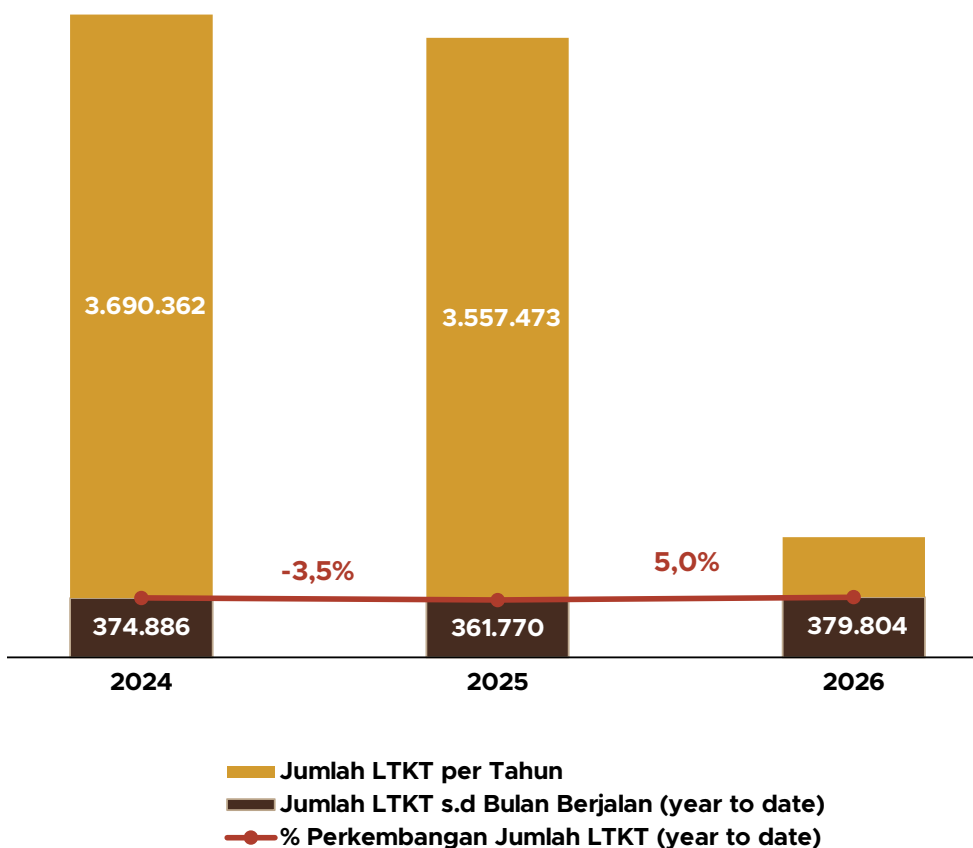
Transaksi Keuangan Tunai adalah transaksi keuangan yang dilakukan dengan menggunakan uang kertas dan/atau uang logam

Pasal 23 Ayat 1 Huruf b

Penyedia Jasa Keuangan wajib menyampaikan Laporan Transaksi Keuangan Tunai dalam jumlah paling sedikit Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing asing yang nilainya setara, yang dilakukan baik dalam satu kali transaksi maupun beberapa kali transaksi dalam 1 (satu) hari kerja.

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2026 (s.d Jan 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan	Total 2024	Jan	Total 2025	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-	-
Total	374.886	3.690.362	361.770	3.557.473	379.804	415

Grafik 7. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTKT dalam 2 Tahun Terakhir s.d Januari 2026



Tabel 8. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai PJK per Kelompok Industri per Bulan

Kelompok Industri	2025			
	Jan	Feb	Mar	Apr
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PJK Bank	359.071	283.862	278.286	272.298
Bank Umum	358.195	283.103	277.357	271.698
Bank Perkreditan Rakyat	876	759	929	600
PJK Non Bank	2.699	3.476	3.538	2.851
Perusahaan Pembiayaan	8	12	9	6
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai Penyedia Jasa Giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	1.733	2.461	2.705	1.994
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan / atau E-Wallet	-	-	-	-
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	50	63	56	61
Pegadaian	205	354	264	363
Perusahaan yang Bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	703	586	504	427
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Total	361.770	287.338	281.824	

Tabel 9. Jumlah Laporan Transaksi Keuangan Tunai Kas Masuk dan Keluar PJK per Kelompok Industri Bulan Januari 2026

Kelompok Industri	Transaksi Keuangan Tunai			
	Kas Masuk		Kas Keluar	
	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi* (Rp)	Jumlah Laporan	Nominal Transaksi* (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
PJK Bank	202.687	346.908	173.963	315.148
Bank Umum	202.151	346.364	173.378	314.507
Bank Perkreditan Rakyat	536	544	585	641
PJK Non Bank	2.198	5.218	956	1.566
Perusahaan Pembiayaan	12	12	-	-
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	855	3.569	904	1.529
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	26	26	10	7
Pegadaian	861	708	41	29
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	444	903	1	1
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	-	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-
Total	204.885	352.126	174.919	316.714

Catatan:

*) Nominal transaksi dalam milyar rupiah.

Tabel 10. Jumlah Kumulatif Transaksi LTKT per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Jumlah Transaksi				
	2024		2025		2026
	Jan	Total 2024	Jan	Total 2025	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PJK Bank	37.316.659	37.316.659	43.282.417	43.282.417	52.147.512
Bank Umum	37.307.891	37.307.891	43.268.420	43.268.420	52.131.673
Bank Perkreditan Rakyat	8.768	8.768	13.997	13.997	15.839
PJK Non Bank	58.211	58.211	65.613	65.613	54.531
Perusahaan Pembiayaan	65	65	130	130	178
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	-	-	-	-
Manajer Investasi	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	47.166	47.166	50.877	50.877	39.705
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	532	532	658	658	2.387
Pegadaian	6.227	6.227	8.624	8.624	4.123
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	-	-	-	-	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	4.220	4.220	5.324	5.324	8.138
Perusahaan Modal Ventura	-	-	-	-	-
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	-	-	-	-	-
Lembaga Keuangan Mikro	1	1	-	-	-
Lembaga Pembiayaan Ekspor	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Penyelenggara layanan Transaksi Keuangan berbasis teknologi informasi	-	-	-	-	-
Total	37.374.870	37.374.870	43.348.030	43.348.030	52.202.043

PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

LPUT

Laporan Pembawaan Uang Tunai Januari 2026



Penerimaan LPUT
pada bulan Januari 2026:

835 Laporan

722

Laporan Pembawaan
Uang Tunai
Lintas Batas Negara

94

Laporan Pembawaan
Uang Tunai Lintas
Batas Negara
Mencurigikan

19

Laporan **Pelanggaran**
Pembawaan Uang
Tunai Lintas Batas
Negara



Pelaporan bulan ini:

↑ 5,6%

Dibandingkan bulan
Desember 2025
(*m-to-m*)

↓ -68,8%

Dibandingkan bulan
Januari 2025
(*y-on-y*)



Tabel 11. Jumlah Laporan Pembawaan Uang Tunai Biasa Berdasarkan Lokasi Pelaporan per Bulan

Lokasi Pelaporan	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4.369	3.316	1.446	14	195	6	699	209	111	32	199	72	-	333	303
Soekarno Hatta	1.846	3.182	1.140	69	327	-	538	183	148	54	210	121	-	392	392
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	96	315	27	30	53	-	102	22	5	7	17	15	-	37	25
Entikong	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	31	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	2	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Tanjungpinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	6.346	6.830	2.627	113	575	6	1.340	414	266	93	426	208	-	762	722



UU No. 8 Tahun 2010

Pasal 34 ayat (1)

Setiap orang yang membawa uang tunai dalam mata uang rupiah dan/atau mata uang asing, dan/atau instrumen pembayaran lain dalam bentuk cek, cek perjalanan, surat sanggup bayar, atau bilyet giro paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau yang nilainya setara dengan itu ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.

Pasal 35 ayat (1)

Setiap orang yang tidak memberitahukan pembawaan uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari seluruh jumlah uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang dibawa dengan jumlah paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 2 ayat (1)

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan tindak pidana pendanaan terorisme, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan laporan Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia ke PPA TK.

Pasal 2 ayat (2)

Laporan Pembawaan Uang Tunai dan/ atau Instrumen Pembayaran Lain ke dalam atau ke luar Daerah Pabean Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:

- Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara yang disampaikan kepada Pejabat Bea dan Cukai;
- Pengenaan sanksi administratif atas pelanggaran Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain dengan nilai paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau dengan mata uang asing yang nilainya setara; dan/atau
- Pembawaan Uang Tunai dan/atau Instrumen Pembayaran Lain yang memenuhi indikator mencurigakan



Perka PPA TK No. 1 Tahun 2022

Tabel 12. Jumlah Pelanggaran Laporan Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Lokasi Pelaporan per Bulan

Lokasi Pelaporan	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	4	22	2	3	-	-	-	-	6	-	1	1	-	9	-
Soekarno Hatta	100	102	31	6	4	-	28	3	2	1	5	9	-	13	17
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	1	6	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	1	2
Entikong	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	25	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	11	6	-	1	-	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-
Atambua	1	7	1	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-
Sintete	22	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	1	3	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjungpinang	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Dumai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cirebon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Teluk Bayur	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	167	155	39	14	8	-	34	3	9	2	8	11	-	28	19

Tabel 13. Jumlah Pembawaan Uang Tunai Mencurigakan Berdasarkan Lokasi Pelaporan

Lokasi Pelaporan	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Batam	2.106	392	-	-	-	-	-	-	1	-	389	2	-	-	94
Soekarno Hatta	174	39	11	-	15	-	11	2	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Balai Karimun	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ngurah Rai	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Entikong	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kualanamu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juanda	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Atambua	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nanga Badau	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Sintete	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pekanbaru	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Yogyakarta	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tanjung Pinang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nunukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mataram	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	2.282	433	11	-	15	-	12	2	1	-	389	2	-	-	94

Tabel 14. Jumlah Kumulatif Pembawaan Uang Tunai Berdasarkan Jenis Pelaporan

Jenis Pelaporan	Laporan					Lokasi Pelaporan Tahun 2026 (Jan 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan	Total 2024	Jan	Total 2025	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
LPUT Biasa	655	6.346	2.627	8.052	722	5
LPUT Mencurigakan	141	2.282	11	2.141	94	1
LPUT Pelanggaran	7	167	39	193	19	2
Total	803	8.795	2.677	10.386	835	

LTPBJ

Laporan Transaksi Penyedia Barang dan/atau Jasa Lain Januari 2026

Jumlah LTPBJ yang disampaikan Pihak Pelapor Januari 2026

9.508
LTPBJ



Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang melaporkan LTPBJ Tahun 2026 (s.d. Januari 2026)

554
Pihak Pelapor

Pelaporan bulan ini

≈ -30,0%

Dibandingkan bulan Desember 2025
(*m-to-m*)

≈ 16,7%

Dibandingkan bulan Januari 2025
(*y-on-y*)

5.752

844

Laporan Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia



Laporan Pedagang Kendaraan Bermotor

2.552

Laporan Perusahaan Properti/ Agen Properti



360

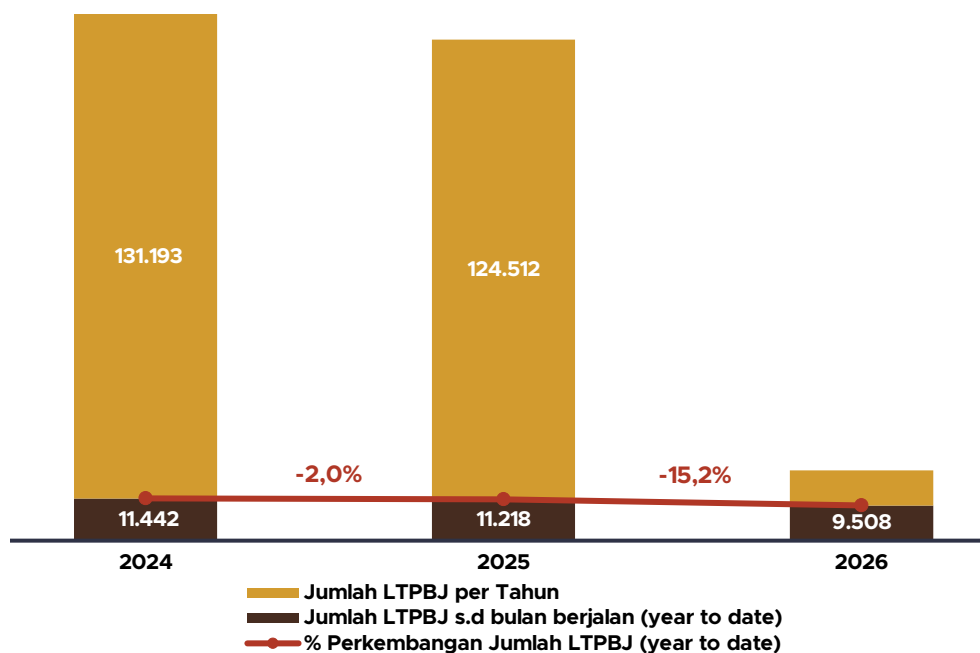
Laporan Balai Lelang dan KPKNL



Tabel 15. Jumlah Kumulatif LTPBJ dan Pihak Pelapor Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Laporan					Pihak Pelapor 2026 (s.d Jan 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan	Total	Jan	Total	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	4.776	41.530	3.213	35.757	2.552	285
Pedagang Kendaraan Bermotor	5.971	78.720	6.508	74.290	5.752	219
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	410	6.747	1.134	9.557	844	7
Balai Lelang dan KPKNL	285	4.196	363	4.908	360	43
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-	-
Total	11.442	131.193	11.218	124.512	9.508	554

Grafik 9. Perkembangan Jumlah Kumulatif Penerimaan LTPBJ dalam 2 Tahun Terakhir s.d Januari 2026



Pasal (1) Ayat 5

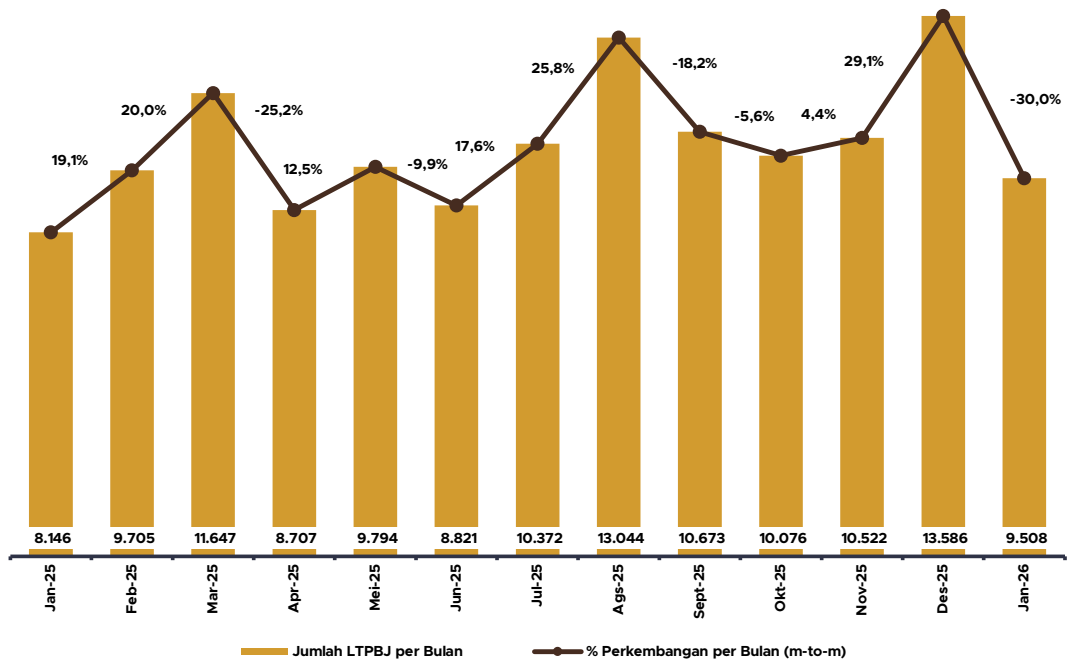
Penyedia barang dan/atau jasa lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b wajib menyampaikan laporan Transaksi yang dilakukan oleh Pengguna Jasa dengan mata uang rupiah dan/atau mata uang asing yang nilainya paling sedikit atau setara dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kepada PPATK.

Tabel 16. Jumlah LTPBJ per Kelompok Industri per Bulan

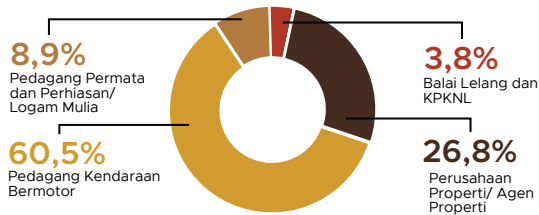
Kelompok Industri	2025					
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	2.292	3.082	3.142	2.410	2.735	3.111
Pedagang Kendaraan Bermotor	4.947	5.458	6.983	4.641	5.648	4.677
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	537	812	1.122	1.346	979	621
Balai Lelang dan KPKNL	370	353	400	310	432	412
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-	-
Total	8.146	9.705	11.647	8.707	9.794	8.821

Kelompok Industri	2025						2026
	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	2.904	2.883	3.418	3.292	3.063	3.296	2.552
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.461	9.145	6.249	5.622	6.239	9.028	5.752
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	490	623	627	630	574	634	844
Balai Lelang dan KPKNL	517	393	379	532	646	628	360
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-	-	-
Total	10.372	13.044	10.673	10.076	10.522	13.586	9.508

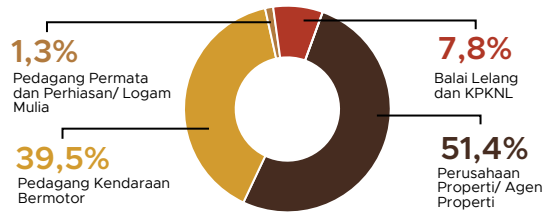
Grafik 10. Perkembangan Jumlah Penerimaan LTPBJ per bulan dalam 1 tahun terakhir



Grafik 11. Distribusi Jumlah Penerimaan LTPBJ Tahun 2026 (s.d Januari 2026)



Grafik 12. Distribusi Jumlah Pihak Pelapor yang Menyampaikan LTPBJ Tahun 2026 (s.d Januari 2026)



Tabel 17. Jumlah Kumulatif Transaksi LTPBJ Per Kelompok Industri

Kelompok Industri	Transaksi				
	2024		2025		2026
	Jan	Total	Jan	Total	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perusahaan Properti/ Agen Properti	4.929	44.284	2.346	36.801	2.598
Pedagang Kendaraan Bermotor	6.659	92.002	5.790	85.966	7.113
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	2.692	38.746	1.833	18.316	1.842
Balai Lelang dan KPKNL	434	5.359	552	6.302	402
Pedagang Barang Seni dan Antik	-	-	-	-	-
Total	14.714	180.391	10.521	147.385	11.955

LTKL

Laporan Transaksi Keuangan
dari/ke Luar Negeri

— Januari 2026 —

Nilai Rata-Rata Transfer
Dana per laporan pada
Januari 2026
(dalam Rupiah)



0,23 M

Incoming



1,79 M

Outgoing

88,6%
LTKL Incoming



11,4%
LTKL Outgoing

Jumlah LTKL*
yang disampaikan
Pihak Pelapor
kepada PPATK

3.696.882
laporan

*Mencakup 3 jenis transaksi
(incoming dan outgoing)
SWIFT, Non-SWIFT, KUPU

Pelaporan
LTKL bulan ini

↑ 1,5%

Dibandingkan bulan
Desember 2025 (m-to-m)

↑ 25,4%

Dibandingkan bulan
Januari 2025 (y-to-y)

Tiga besar negara tujuan dan asal transfer dana terbesar
berdasarkan nominal transaksi

Incoming



Singapura



Amerika Serikat



Hong Kong

Outgoing



Singapura



Amerika Serikat



Tiongkok

Pelaporan dimulai sejak
Januari 2014
Dilaporkan oleh:



Penyedia Jasa Keuangan
(PJK): Bank,



Penyelenggara E-Money
dan/atau E-Wallet dan,



Penyelenggara Kegiatan
Usaha
Pengiriman Uang (KUPU).

Tabel 18. Jumlah Laporan Transfer Dana Dari dan/ ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Ribuan), per Bulan

Jenis Transaksi	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	26.962	54.656	2.605	2.981	2.771	2.946	2.788	3.073	3.164	2.818	3.031	3.198	2.657	3.211	3.275
SWIFT	6.112	10.774	369	428	394	384	359	385	446	390	428	430	365	409	434
NON-SWIFT	20.830	43.839	2.235	2.552	2.375	2.560	2.428	2.686	2.716	2.426	2.601	2.766	2.290	2.800	2.839
KUPU	20	43	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2	2	2	2
Ke Luar Negeri	3.524	7.511	366	365	343	342	350	368	434	382	413	426	374	432	422
SWIFT	3.355	6.994	323	319	302	296	307	322	376	334	349	363	317	369	355
NON-SWIFT	150	467	40	44	39	44	41	44	56	46	61	60	54	60	65
KUPU	19	50	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	4	3
Total	30.485	62.167	2.971	3.346	3.114	3.287	3.138	3.441	3.598	3.200	3.444	3.624	3.031	3.643	3.697

Tabel 19. Jumlah Kumulatif LTKL dan Pihak Pelapor per Kelompok Industri

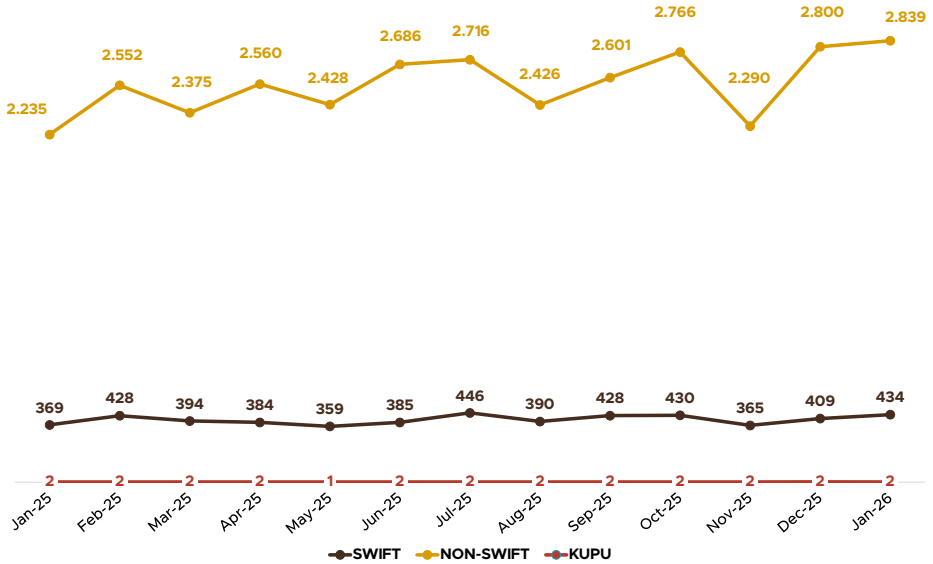
Kelompok Industri	Jumlah Laporan					Jumlah Pihak Pelapor Tahun 2026 (s.d. Jan 2026)
	2024		2025		2026	
	Jan	Total	Jan	Total	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Bank	2.851.827	31.626.500	2.966.991	39.785.389	6.692.466	73
Penyelenggara e-money dan/ atau e-wallet	15	30	-	2	-	-
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	3.709	55.122	3.836	50.526	8.465	82
Total	2.855.551	31.681.652	2.970.827	39.835.917	6.700.931	155



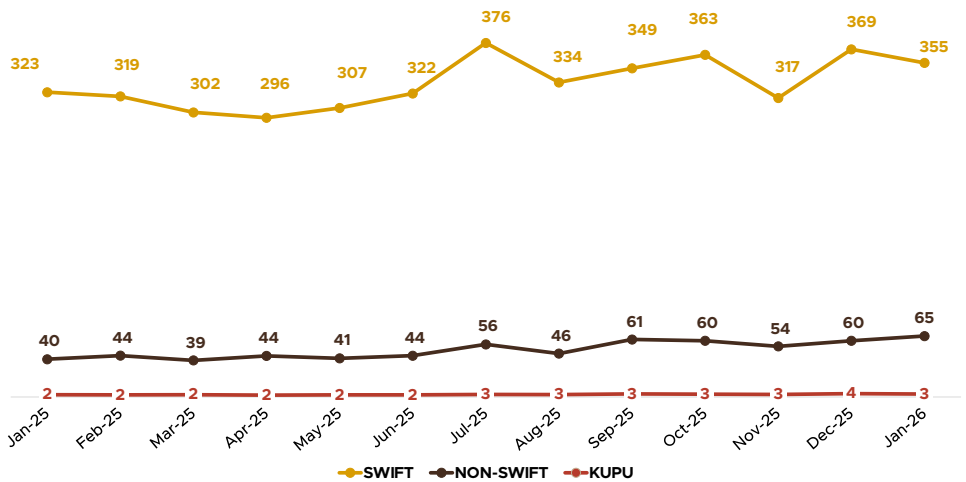
Pasal 1 Ayat (4)

Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri adalah rangkaian kegiatan yang dimulai dengan perintah dari Pengirim Asal kepada Penyelenggara Pengirim Asal yang bertujuan memindahkan sejumlah Dana dari luar wilayah Indonesia atau ke luar wilayah Indonesia kepada Penerima yang disebutkan dalam Perintah Transfer Dana sampai dengan diterimanya Dana oleh Penerima pada Penyelenggara Penerima Akhir tidak termasuk aktivitas transfer dalam negeri

Grafik 13. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana dari Luar Negeri (*Incoming*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Januari 2025 s.d. Januari 2026 (dalam Ribuan)



Grafik 14. Perkembangan Jumlah Laporan Transfer Dana ke Luar Negeri (*Outgoing*) Berdasarkan Jenis Transaksi, Januari 2025 s.d. Januari 2026 (dalam Ribuan)



Tabel 20. Jumlah Nominal Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Triliun Rupiah), per Bulan

Jenis Transaksi	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	11.551	7.279	661	640	648	665	640	660	789	624	733	769	674	860	745
SWIFT	11.102	6.746	610	583	595	612	588	609	725	579	679	711	600	786	685
NON-SWIFT	369	398	40	46	39	42	43	39	51	34	41	46	62	60	48
KUPU	80	134	11	11	13	12	10	12	12	11	14	13	12	15	12
Ke Luar Negeri	8.154	7.129	673	616	602	642	648	678	796	565	723	714	611	782	757
SWIFT	7.849	6.772	636	580	570	605	619	653	763	544	687	681	580	740	725
NON-SWIFT	261	267	31	30	26	31	23	19	27	15	25	26	23	31	23
KUPU	45	90	6	6	6	6	6	6	6	6	11	8	7	12	9
Total	19.706	14.407	1.334	1.256	1.250	1.307	1.288	1.339	1.585	1.190	1.456	1.483	1.285	1.642	1.502

Tabel 21. Jumlah Transaksi Transfer Dana Dari dan Ke Luar Negeri Berdasarkan Jenis Transaksi (dalam Ribuan), per Bulan

Jenis Transaksi	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Dari Luar Negeri	41.612	47.305	4.446	4.733	4.861	4.786	4.251	4.957	4.988	4.504	5.032	5.156	4.577	5.589	5.203
SWIFT	6.250	4.784	382	441	404	394	367	394	455	399	436	439	371	417	442
NON-SWIFT	20.830	23.019	2.236	2.553	2.377	2.560	2.429	2.688	2.718	2.427	2.602	2.767	2.291	2.801	2.840
KUPU	14.531	19.503	1.827	1.739	2.080	1.831	1.455	1.875	1.816	1.678	1.994	1.950	1.915	2.371	1.921
Ke Luar Negeri	5.193	6.008	550	549	512	517	525	554	666	572	640	652	581	660	672
SWIFT	3.422	3.703	338	325	309	303	312	329	383	341	355	370	323	376	361
NON-SWIFT	150	317	40	44	39	44	41	44	56	46	61	60	54	60	65
KUPU	1.621	1.988	172	180	165	170	172	181	227	185	224	222	204	224	246
Total	46.805	53.313	4.996	5.282	5.374	5.303	4.776	5.511	5.654	5.076	5.672	5.808	5.158	6.249	5.875

Tabel 22. Daftar 20 Negara Asal Transfer Dana (*Incoming*) berdasarkan Jumlah LTKL Terbanyak, Januari 2026

Negara Asal	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Malaysia	742.391
Taiwan	494.615
Singapura	373.958
Jepang	360.910
Amerika Serikat	309.303
Korea Selatan	206.995
Australia	162.264
Hong Kong	95.546
Uni Emirat Arab	70.015
Arab Saudi	69.281
Inggris	62.720
Belanda	44.356
Jerman	37.382
Brunei Darussalam	26.133
Irlandia	20.854
Polandia	16.572
Prancis	13.920
Qatar	13.427
Timor Leste	12.313
Tiongkok	10.429
Lainnya	131.382
Total	3.274.766

Catatan:

96% dari jumlah LTKL INCOMING secara keseluruhan pada bulan Januari 2026 berasal dari 20 negara di atas.

Tabel 23. Daftar 20 Negara Tujuan Transfer Dana (*Outgoing*) berdasarkan Jumlah LTKL Terbanyak, Januari 2026

Negara Tujuan	Jumlah LTKL
(1)	(2)
Tiongkok	129.668
Singapura	48.883
Amerika Serikat	44.671
Hong Kong	34.699
Malaysia	27.534
Australia	19.588
Inggris	15.475
Jepang	11.892
Korea Selatan	10.836
India	9.922
Thailand	8.984
Jerman	6.973
Taiwan	6.426
Prancis	5.586
Belanda	5.004
Uni Emirat Arab	3.665
Vietnam	3.619
Italia	3.301
Kanada	3.246
Filipina	2.717
Lainnya	19.427
Total	422.116

Catatan:

95% dari jumlah LTKL OUTGOING secara keseluruhan pada bulan Januari 2026 ditujukan ke 20 negara di atas.

Tabel 24. Daftar 20 Negara Asal Transfer Dana (Incoming) berdasarkan Jumlah Nominal Transaksi Terbesar, Januari 2026

Negara Asal	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	279.311
Amerika Serikat	151.858
Hong Kong	98.347
Tiongkok	52.444
Inggris	42.249
Jepang	42.121
Malaysia	31.369
Korea Selatan	29.683
Taiwan	28.412
Uni Emirat Arab	28.235
Jerman	20.625
Thailand	19.814
Australia	17.736
Belanda	16.231
India	15.356
Prancis	15.288
Filipina	13.199
Spanyol	12.686
Swiss	12.355
Turki	11.838

Tabel 25. Daftar 20 Negara Tujuan Transfer Dana (Outgoing) berdasarkan Jumlah Nominal Transaksi Terbesar, Januari 2026

Negara Tujuan	Nominal Transaksi (Miliar Rupiah)
(1)	(2)
Singapura	262.710
Amerika Serikat	152.121
Tiongkok	113.407
Hong Kong	77.581
Inggris	42.825
Jepang	30.262
Malaysia	20.299
Korea Selatan	20.153
Thailand	18.578
Taiwan	18.430
Uni Emirat Arab	16.990
Jerman	13.858
Australia	13.479
Arab Saudi	12.837
India	11.941
Prancis	11.613
Vietnam	10.892
Belanda	10.578
Swiss	8.036
Kanada	7.677

LPT

Laporan Penundaan Transaksi

Januari 2026

Penerimaan dokumen penundaan transaksi pada Januari 2026

1.684

Dokumen

Penerimaan Dokumen LPT bulan ini:

↑ 49,3%

Dibandingkan bulan Desember 2025 (*m-to-m*)

↑ 83,6%

Dibandingkan bulan Januari 2025 (*y-to-y*)

Penundaan Transaksi

92,1%

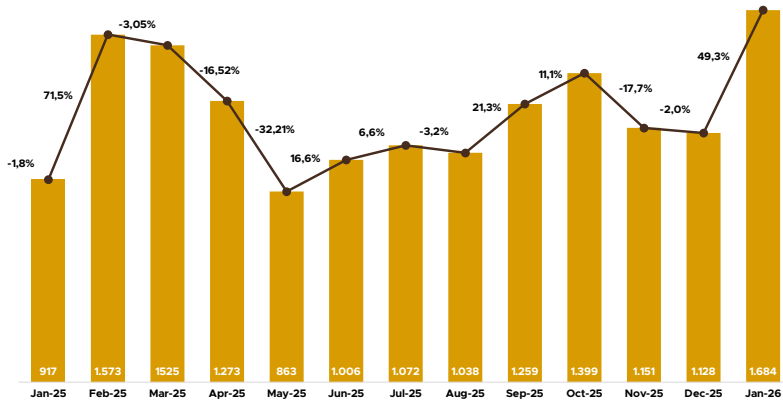
Laporan memenuhi aspek formil

48,6%

Penundaan Transaksi dilakukan oleh Pedagang Aset Kripto



Grafik 15. Jumlah Dokumen LPT yang diterima PPATK per bulan selama 1 tahun terakhir



Tabel 26. Jumlah Dokumen LPT yang diterima PPATK berdasarkan Jenis Pihak Pelapor

Kelompok Industri	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK Bank	2.402	13.455	912	1.545	1.493	1.249	845	969	1.018	995	1.217	1.344	1.097	772	844
Bank Umum	2.402	13.455	912	1.545	1.493	1.249	845	969	1.018	995	1.217	1.344	1.096	772	844
Bank Asing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Campuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Milik Negara	214	914	35	68	83	51	71	67	96	81	88	101	105	68	97
Bank Pembangunan Daerah	20	119	5	2	24	16	9	16	-	-	2	16	18	11	29
Bank Swasta	2.168	12.422	872	1.475	1.386	1.182	765	886	922	914	1.127	1.227	973	693	718
Bank Perkreditan Rakyat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
PJK Non Bank	31	748	5	28	32	24	18	37	54	43	42	55	54	356	840
Total	2.433	14.203	917	1.573	1.525	1.273	863	1.006	1.072	1.038	1.259	1.399	1.151	1.128	1.684

Catatan:

*) Dokumen LPT mencakup 1 dokumen berita acara penundaan transaksi yang disampaikan kepada PPATK melalui aplikasi GoAML



UU No. 8 Tahun 2010

Pasal (26) Ayat (1)

1. Penyedia Jasa Keuangan dapat melakukan penundaan transaksi paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak penundaan transaksi dilakukan.
2. Penundaan transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal Pengguna Jasa
 - a. melakukan Transaksi yang patut diduga menggunakan Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
 - b. memiliki rekening untuk menampung Harta Kekayaan yang berasal dari hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1); atau
 - c. diketahui dan/atau patut diduga menggunakan Dokumen palsu.
3. Pelaksanaan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam berita acara penundaan Transaksi.
4. Penyedia jasa keuangan memberikan salinan berita acara penundaan Transaksi kepada Pengguna Jasa.
5. Penyedia jasa keuangan wajib melaporkan penundaan Transaksi kepada PPATK dengan melampirkan berita acara penundaan Transaksi dalam waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam terhitung sejak waktu penundaan Transaksi dilakukan.
6. Setelah menerima laporan penundaan Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) PPATK wajib memastikan pelaksanaan penundaan Transaksi dilakukan sesuai dengan Undang-Undang ini
7. Dalam hal penundaan Transaksi telah dilakukan sampai dengan hari kerja kelima, penyedia jasa keuangan harus memutuskan akan melaksanakan Transaksi atau menolak Transaksi tersebut.

HA

Hasil Analisis

Januari 2026



Jumlah Hasil Analisis yang dihasilkan PPATK pada Januari 2026

83 Hasil Analisis

-30,8

dibandingkan bulan Desember 2025 (*m-to-m*)

2,5%

dibandingkan bulan Januari 2025 (*y-on-y*)

Kategori Terlapor pada **HA Proaktif**:

70% Perorangan



Mayoritas Locus pada **HA Proaktif**:

35%

DKI Jakarta

Persentase Hasil Analisis yang dihasilkan PPATK pada Januari 2026 berdasarkan jenis HA



Mayoritas Tindak Pidana Asal pada **Hasil Analisis**



27,2%
TP Penipuan



16,9%
TP Korupsi



15,7%
TP Perpajakan



10,8%
TP Narkotika



Tabel 27. Jumlah HA yang disampaikan per Bulan

Jenis HA	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Proaktif	347	358	23	22	28	19	26	34	20	38	29	35	47	37	20
Reaktif	457	632	58	54	85	35	46	43	42	53	24	64	45	83	63
Total	804	990	81	76	113	54	72	77	62	91	53	99	92	120	83

Catatan:

- Rekapitulasi per bulan didasarkan pada bulan surat penyampaian Hasil Analisis kepada *Stakeholders*

Tabel 28. Jumlah HA yang disampaikan berdasarkan Tujuan Instansi

Tujuan Penyampaian HA	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	412	515	39	42	55	34	46	35	33	47	26	47	52	59	51
Kejaksaan	106	154	9	8	29	7	9	13	13	17	10	14	9	16	11
KPK	91	92	10	6	3	2	4	6	2	12	11	7	11	18	2
Ditjen Pajak	139	173	17	16	18	7	8	16	10	12	4	29	15	21	13
Ditjen Bea dan Cukai	8	7	1	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	2	2
Badan Narkotika Nasional (BNN)	22	23	-	3	3	2	-	5	3	2	1	-	3	1	3
PPNS dan/ atau Lembaga Lainnya	26	26	5	1	4	-	5	2	1	1	1	2	1	3	1
Total	804	990	81	76	113	54	72	77	62	91	53	99	92	120	83



UU No. 8 Tahun 2010

Pasal (2) ayat (2)

Harta Kekayaan yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk kegiatan terorisme, organisasi teroris, atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf n

Pasal (44) ayat (1) huruf e dan l

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat:

- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri
- l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada penyidik

Tabel 29. Jumlah HA terkait dugaan Tindak Pidana Terorisme dan/atau Pendanaan Terorisme

Jenis HA	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Proaktif	10	20	2	1	2	1	-	1	1	5	-	1	2	4	2
Reaktif	15	25	1	6	4	1	-	1	-	3	-	3	3	3	2
Total	25	45	3	7	6	2	-	2	1	8	-	4	5	7	4

Tabel 30. Jumlah HA Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	5.762	28.090	50	65	97	79	53	27.018	98	103	82	170	90	185	14
Korporasi	210	422	23	20	24	25	22	159	17	39	21	10	43	19	6
Total	5.972	28.512	73	85	121	104	75	27.177	115	142	103	180	133	204	20

Catatan:

Pihak Terlapor dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Hasil Analisis sehingga jumlah pada kategori terlapor akan berbeda dengan jumlah pada parameter lainnya.

Tabel 31. Jumlah HA Proaktif Menurut *Locus* (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana

Wilayah ^{*)}	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Aceh	6	7	-	-	-	1	-	1	1	2	-	1	-	1	2
Sumatera Utara	21	20	1	-	-	2	1	3	1	1	-	3	4	4	5
Sumatera Barat	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	2
Sumatera Selatan	2	15	1	1	-	-	3	1	-	2	-	1	1	5	-
Bengkulu	-	3	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Jambi	1	6	-	-	1	2	-	1	-	1	-	-	-	1	-
Riau	18	13	-	-	4	1	1	2	1	2	-	1	-	1	4
Kepulauan Riau	3	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	1	1
Lampung	2	5	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	1	1	2
Kep Bangka Belitung	8	3	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
Banten	10	25	5	1	1	-	3	2	1	-	1	4	2	5	3
DKI Jakarta	145	143	8	12	10	11	6	14	9	15	15	14	22	7	33
Jawa Barat	37	45	5	2	2	2	4	6	1	6	5	2	6	4	14
Jawa Tengah	13	13	2	1	-	-	1	2	-	1	-	2	1	3	5
Jawa Timur	48	30	-	3	2	-	5	3	1	4	2	4	2	4	12
DI Yogyakarta	7	6	-	-	-	-	-	1	-	1	-	1	1	2	-
Bali	7	9	-	-	-	-	-	1	-	-	3	1	3	1	3
Nusa Tenggara Barat	2	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-
Nusa Tenggara Timur	2	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Maluku	1	9	1	-	-	-	1	2	-	1	3	-	1	-	-
Maluku Utara	3	2	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Barat	18	14	1	1	-	-	-	3	1	2	-	1	5	-	-
Kalimantan Timur	14	13	-	2	2	-	1	1	1	1	2	-	3	-	-
Kalimantan Tengah	6	3	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	2
Kalimantan Selatan	12	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Kalimantan Utara	6	6	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	-	2
Sulawesi Utara	3	5	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1
Sulawesi Selatan	12	9	1	-	2	-	1	2	-	-	-	1	-	2	-
Sulawesi Tengah	1	3	-	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-	1
Sulawesi Tenggara	3	8	-	1	-	-	-	2	2	-	1	-	2	-	1
Sulawesi Barat	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Gorontalo	1	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Papua	3	9	-	-	1	-	-	3	-	2	-	1	2	-	1
Papua Barat	1	4	-	1	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-
Papua Tengah	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lain-Lain	7	8	1	-	3	-	-	1	1	1	-	-	1	-	-
Total	425	452	30	25	30	20	27	70	22	48	35	39	63	43	94

Catatan:

*) Wilayah dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Informasi Transaksi Keuangan sehingga Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Terkait Tindak Pidana Menurut Locus (Tempat Kejadian) akan berbeda dengan jumlah pada parameter lainnya.

Tabel 32. Jumlah HA per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	2	3	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Di Bidang Kehutanan	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	21	42	2	2	3	-	5	7	3	5	4	2	7	2	1
Di Bidang Pasar Modal	9	4	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1
Di Bidang Perasuransian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
Di Bidang Perbankan	14	12	2	1	-	-	1	1	2	1	2	2	-	-	1
Di Bidang Perpajakan	140	173	17	16	18	7	8	16	10	12	4	29	15	21	13
Kepabeanaan	3	7	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	4	1	1
Korupsi	239	302	22	19	31	14	33	21	19	31	22	26	25	39	14
Narkotika	119	94	8	9	8	3	4	9	11	12	3	7	11	9	9
Pemalsuan Uang	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penggelapan	18	24	8	1	3	-	3	1	1	1	1	2	-	3	4
Penipuan	101	132	11	6	21	12	9	12	10	13	3	5	7	23	23
Penyelundupan Migran	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Barang	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	7	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
Perdagangan Orang	4	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	1	1
Perdagangan Senjata Gelap	3	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perjudian	58	56	5	8	8	5	4	2	2	3	1	5	8	5	7
Prostitusi	4	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psikotropika	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	25	45	3	7	6	2	-	2	1	8	-	4	5	7	4
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	18	21	-	3	4	4	-	1	1	2	1	2	2	1	-
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	-	22	-	3	9	-	-	-	2	1	7	-	-	-	-
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	14	38	-	-	-	5	3	3	-	-	5	14	4	4	2
Aset Tracing	-	4	-	-	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1
Total	804	990	81	76	113	54	72	77	62	91	53	99	92	120	83

PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

HP

Hasil Pemeriksaan Januari 2026

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, PPAK menyampaikan Hasil Pemeriksaan kepada Instansi Penegak Hukum.

Jumlah HP yang disampaikan ke penyidik



Januari 2026



Tahun 2026
(s.d Jan)



Mayoritas HP yang disampaikan

Locus (Tempat Kejadian) Mayoritas pada HP Tahun 2026 (s.d Jan)



Tindak Pidana Asal Mayoritas pada HP Tahun 2026 (s.d Jan)



Tabel 33. Jumlah HP yang disampaikan oleh PPATK kepada Penyidik per Bulan

Penyidik	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	8	7	1	2	-	-	1	-	-	1	-	-	1	1	-
Kejaksaan	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KPK	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
BNN	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DJP	2	4	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	2	-
DJBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
PPNS	3	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Total	19	17	2	3	-	1	2	-	1	1	-	1	1	5	-

Tabel 34. Daftar 10 Teratas Provinsi Menurut Locus (Tempat Kejadian) berdasarkan Jumlah Hasil Pemeriksaan

Wilayah ^{*)}	Jumlah HP		
	2024	2025	2026 s.d Jan
(1)	(2)	(3)	(4)
DKI Jakarta	7	10	-
Jawa Tengah	5	2	-
Jawa Barat	2	3	-
Kalimantan Timur	2	1	-
Sumatera Utara	1	2	-
Sumatera Selatan	2	-	-
Banten	1	1	-
Jawa Timur	1	1	-
Papua	1	-	-
Kepulauan Riau	1	-	-
Lainnya	7	3	-
Total	30	23	-

Catatan:

^{*)} Wilayah dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Informasi Transaksi Keuangan sehingga Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Terkait Tindak Pidana Menurut Locus (Tempat Kejadian) akan berbeda dengan jumlah pada parameter lainnya.



**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal 1 ayat (7)

Hasil Pemeriksaan adalah penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi Transaksi Keuangan Mencurigakan yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional yang disampaikan kepada penyidik.

Tabel 35. Daftar 10 Teratas Dugaan Tindak Pidana Asal berdasarkan Jumlah Hasil Pemeriksaan terbanyak

Wilayah*)	Jumlah HP		
	2024	2025	2026 s.d Jan
(1)	(2)	(3)	(4)
Korupsi	6	3	-
Di Bidang Perpajakan	2	4	-
Di Bidang Pasar Modal	2	2	-
Narkotika	2	2	-
Perjudian	1	1	-
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	2	-	-
Di Bidang Kehutanan	1	1	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	1	1	-
Penyuapan	-	1	-
Penipuan	-	1	-
Lainnya	2	3	-
Total	30	23	-

PPATK**NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

INFORMASI

Transaksi Keuangan

Januari 2026

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi transaksi keuangan yang berindikasi tindak pidana pencucian uang, PPAATK menyampaikan Informasi kepada penyidik lainnya Non APH misalnya PPNS. Informasi yang disampaikan juga termasuk dengan informasi seleksi jabatan strategis.

Jumlah Informasi
yang disampaikan

41
Informasi

Mayoritas
Klasifikasi Informasi

70,7%

Informasi terkait
Tindak Pidana

Mayoritas Tujuan
Penyampaian
Informasi

19,5%

Badan Intelijen
Negara

Informasi Analisis Transaksi Keuangan Bulan Ini

22,9%

Dibandingkan bulan
Desember 2025
(m-to-m)

-2,3%

Dibandingkan bulan
Januari 2025
(c-to-c)

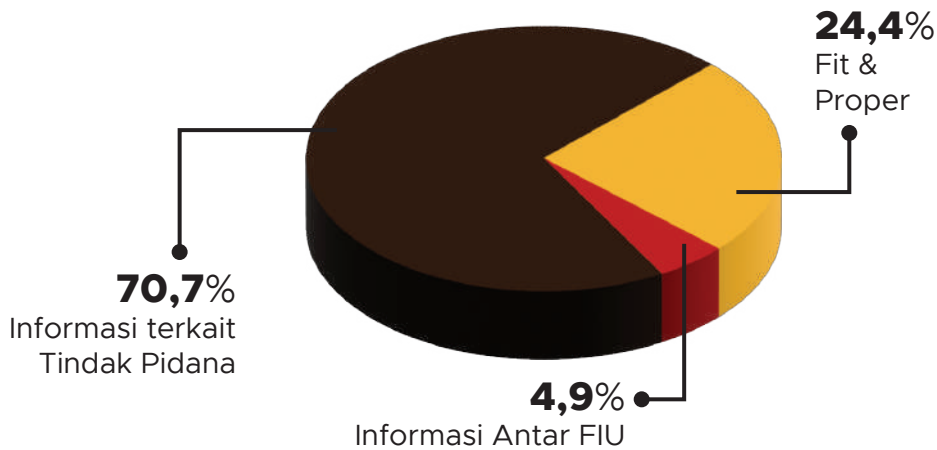
Tabel 36. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan per Bulan

Jenis Informasi	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PROAKTIF															
Informasi	85	140	4	4	16	14	5	13	14	11	17	4	26	12	6
REAKTIF															
Informasi	440	387	40	31	28	25	35	46	53	43	18	29	16	23	35
Total	525	527	44	35	44	39	40	59	67	54	35	33	42	35	41

Tabel 37. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan berdasarkan Jenis Informasi per Bulan

Informasi	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Fit and Proper	263	240	23	18	23	16	19	38	40	25	4	15	8	11	10
Informasi antar FIU	33	42	4	1	5	1	6	3	3	5	1	2	2	9	2
Informasi terkait Tindak Pidana	229	245	17	16	16	22	15	18	24	24	30	16	32	15	29
Total	525	527	44	35	44	39	40	59	67	54	35	33	42	35	41

Grafik 16. Distribusi Jumlah Informasi Jan 2026



UU No. 8 Tahun 2010

Pasal 44 Ayat 1

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPAK dapat:

- e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri”

Tabel 38. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan yang disampaikan berdasarkan tujuan Kementerian/Lembaga per Bulan

Informasi	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Kepolisian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BPKP	1	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
KPK	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sekretariat Kabinet	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bawaslu	39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bank Indonesia	14	37	8	8	2	1	1	1	6	1	4	4	1	-	7
Badan Intelijen Negara	31	40	3	1	1	3	5	3	3	6	8	2	2	3	8
BNPT	63	20	4	5	3	1	-	-	2	1	-	1	1	2	7
Mahkamah Agung	10	11	-	-	-	-	1	1	-	-	-	4	3	2	4
Komisi Yudisial	12	16	-	-	-	-	-	7	6	1	-	-	1	1	-
Otoritas Jasa Keuangan	170	137	11	8	13	12	13	29	25	16	4	1	4	1	7
Kementerian Keuangan	11	12	1	2	-	-	2	2	4	-	-	-	1	-	-
Kementerian Dalam Negeri	21	8	2	-	1	1	-	3	-	-	-	-	1	-	-
Kemenkumham	4	2	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Badan Pemeriksa Keuangan	10	5	-	1	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-
Lainnya	83	190	11	9	19	18	12	10	16	19	18	18	24	16	6
FIU Negara Lain	33	46	4	1	5	1	6	3	4	9	1	2	1	9	2
Total	525	527	44	35	44	39	40	59	67	54	35	33	42	35	41

Tabel 39. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Proaktif berdasarkan kategori Terlapor

Kategori Terlapor	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Perorangan	421	439	38	25	39	33	34	51	53	47	27	26	37	29	24
Korporasi	64	78	3	10	5	5	6	8	14	6	6	6	5	4	15
Korporasi dan Perorangan	40	10	3	-	-	1	-	-	-	1	2	1	-	2	2
Total	525	527	44	35	44	39	40	59	67	54	35	33	42	35	41

Tabel 40. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Terkait Tindak Pidana Menurut Locus (Tempat Kejadian) Indikasi Tindak Pidana

Wilayah ⁹⁾	2024	2025	2025												2026	
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
Aceh	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Sumatera Utara	2	10	1	2	-	1	-	4	1	-	-	-	1	-	2	
Sumatera Barat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sumatera Selatan	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	
Bengkulu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Jambi	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	
Riau	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	
Kepulauan Riau	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	
Lampung	1	3	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	
Kep Bangka Belitung	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	
Banten	8	12	3	-	-	2	2	-	-	-	3	-	1	1	2	
DKI Jakarta	47	117	4	7	8	11	7	3	17	8	16	9	22	5	12	
Jawa Barat	26	34	1	2	3	2	6	1	-	5	6	5	-	3	3	
Jawa Tengah	13	21	4	2	1	2	-	1	2	4	1	1	2	1	4	
Jawa Timur	13	10	2	1	-	2	-	1	-	-	3	-	1	-	5	
DI Yogyakarta	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	
Bali	2	4	1	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	
Nusa Tenggara Barat	-	6	-	-	-	-	-	3	-	-	3	-	-	-	2	
Nusa Tenggara Timur	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	
Maluku	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Maluku Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kalimantan Barat	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	
Kalimantan Timur	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	
Kalimantan Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kalimantan Selatan	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Kalimantan Utara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Utara	3	5	-	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Selatan	4	3	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Tengah	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Sulawesi Barat	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gorontalo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua	1	9	-	-	-	1	-	3	2	-	3	-	-	-	-	
Papua Barat	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua Tengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua Selatan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua Pegunungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Papua Barat Daya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Lain-Lain	2	10	-	-	1	1	-	-	2	6	-	-	-	-	-	
Total	139	262	17	16	16	27	17	18	24	26	38	16	32	15	33	

Catatan:

*) Wilayah dapat berjumlah lebih dari satu dalam satu Informasi Transaksi Keuangan sehingga Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Terkait Tindak Pidana Menurut *Locus* (Tempat Kejadian) akan berbeda dengan jumlah pada parameter lainnya.

Tabel 41. Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Terkait Tindak Pidana per Bulan berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Cukai	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Kehutanan	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Kelautan dan Perikanan	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Lingkungan Hidup	4	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Pasar Modal	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Di Bidang Perasuransian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Di Bidang Perbankan	7	15	2	1	-	3	1	1	1	2	1	3	-	-	1
Di Bidang Perpajakan	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Kepabeanan	-	4	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-
Korupsi	50	53	2	5	7	7	2	7	4	2	-	7	2	8	2
Narkotika	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	1	-	-	-	-
Pemalsuan Uang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penculikan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pencurian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Penggelapan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penipuan	4	7	-	-	1	-	-	1	1	2	1	-	1	-	1
Penyelundupan Migran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Tenaga Kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelundupan Barang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyuapan	3	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
Perdagangan Orang	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
Perdagangan Senjata Gelap	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perjudian	2	35	-	-	3	2	-	2	1	4	1	-	21	1	-
Prostitusi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Psikotropika	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Terorisme/ Pendanaan Terorisme	91	52	7	6	4	3	3	2	5	6	8	2	2	4	15
Penyebaran Berita Bohong (ITE)	-	8	-	-	-	-	1	3	2	1	-	-	1	-	-
Indikasi Tindak Pidana lain yang diancam pidana 4 tahun	43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9
TP Lainnya/Tidak teridentifikasi	22	56	5	3	1	5	5	1	5	4	17	4	4	2	-
Aset Tracing	-	3	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	230	245	17	16	16	22	15	18	24	24	30	16	32	15	29

Tabel 42. Daftar 20 Negara Asal/Tujuan berdasarkan Informasi Transaksi Keuangan Antar FIU per Tahun terbanyak

Negara Asal/Tujuan	Jumlah Informasi Transaksi Keuangan Antar FIU		
	2024	2025	2026 s.d Jan
(1)	(2)	(3)	(4)
Singapura	9	3	-
Australia	5	5	-
Malaysia	5	2	1
Amerika Serikat	3	4	-
Thailand	2	3	-
Tiongkok	-	4	1
Nigeria	-	4	-
Irlandia	-	3	-
Filipina	1	2	-
Taiwan	-	2	-
Belanda	1	1	-
Rusia	1	1	-
Swedia	-	1	-
Kazakhstan	-	1	-
Cambodia	-	1	-
New Zealand	-	1	-
Vietnam	1	-	-
Isle of Man	-	1	-
Jerman	1	-	-
Republic of Belarus	-	1	-
Lainnya	4	2	-
Total	33	42	2

PERMINTAAN INFORMASI

Kepada Pihak Pelapor dan Informasi Terkait

Januari 2026

PPATK meminta informasi kepada pihak pelapor/Instansi terkait dalam rangka melaksanakan fungsi analisis dan pemeriksaan transaksi keuangan mencurigakan

Jumlah Permintaan Informasi

596



PJK Bank

62,4%



PJK Non-Bank

37,2%



PBJ

0,0%



Profesi

0,0%



Regulator/
Instansi Lainnya

0,3%

∨ -44,5%

Dibandingkan
Desember 2025 (m-to-m)

∨ -44,5%

Dibandingkan
Januari 2025 (y-to-y)



Tabel 43. Jumlah Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor/ Instansi Terkait per Bulan

Tujuan Permintaan Informasi	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK Bank	8.361	9.168	890	1.002	1.250	635	523	748	793	542	710	853	500	722	372
PJK Non Bank	2.853	3.170	182	262	212	184	167	310	232	190	453	250	377	351	222
PBJ	10	26	1	3	4	8	6	2	0	0	0	0	2	0	0
Profesi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulator/Instansi Lainnya	13	10	0	1	2	1	0	1	0	0	0	3	1	1	2
Total	11.237	12.374	1.073	1.268	1.468	828	696	1.061	1.025	732	1.163	1.106	880	1.074	596

Tabel 44. Jumlah Kumulatif Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor dan Instansi Terkait Tahun 2024-2026 (s.d. Januari 2026)

Tujuan Permintaan Informasi	2024		2025		2026
	Jan	Total	Jan	Total	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PJK Bank	930	8.361	890	9.168	372
PJK Non Bank	247	2.853	182	3.170	222
PBJ	1	10	1	26	0
Profesi	0	0	0	0	0
Regulator/Instansi Lainnya	4	13	0	10	2
Total	1.182	11.237	1.073	12.374	596



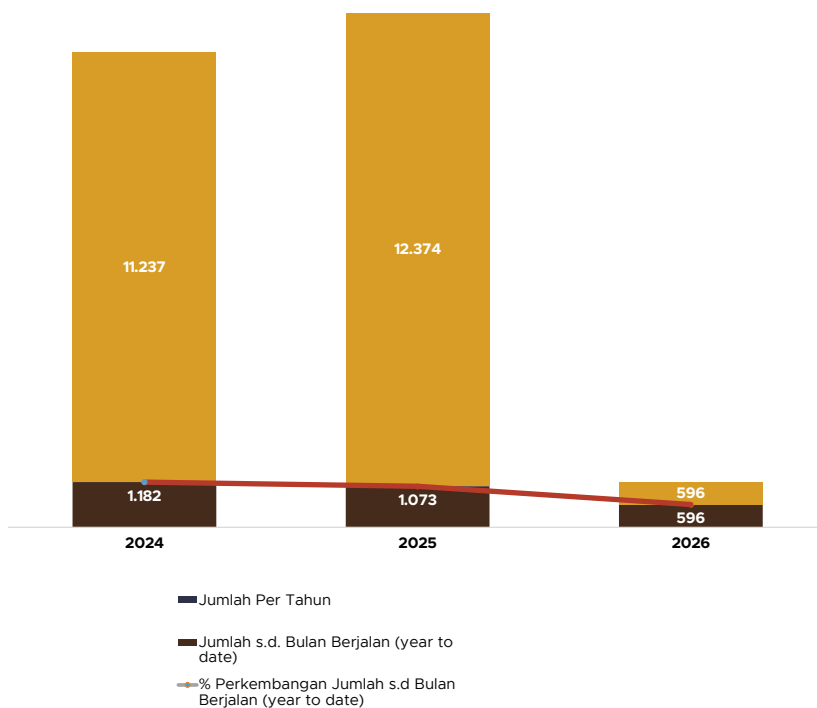
**UU No 8
Tahun 2010**

Pasal 44 ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan informasi, PPATK dapat:

- meminta dan menerima laporan dan informasi dari Pihak Pelapor;
- meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait;
- meminta informasi kepada Pihak Pelapor berdasarkan pengembangan hasil

Grafik 17. Perkembangan Jumlah Permintaan Informasi kepada Pihak Pelapor/Instansi Terkait Hingga Bulan Berjalan dan Akhir Tahun, Dalam 2 Tahun Terakhir



PPATK **NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

PERTUKARAN INFORMASI

PPATK dengan FIU

Januari 2026

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan TPPU/TPPT, PPATK melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian dan penerimaan informasi dengan *Financial Intelligence Unit (FIU)* luar negeri ataupun lembaga internasional yang menjalankan fungsi FIU

4,5%

Spontaneous Outgoing:
PPATK memberikan informasi kepada FIU lain secara proaktif

22

Pertukaran Informasi

13,6%

Spontaneous Outgoing:
PPATK menerima informasi proaktif dari FIU lain

18,2%

Outgoing Request:
PPATK mengirimkan permintaan informasi ke FIU lain.

63,6%

Incoming Request:
PPATK menerima permintaan informasi dari FIU lain

Pertukaran Informasi Bulan Ini

⬆️ 22,2%

Dibandingkan bulan Desember 2025 (m-to-m)

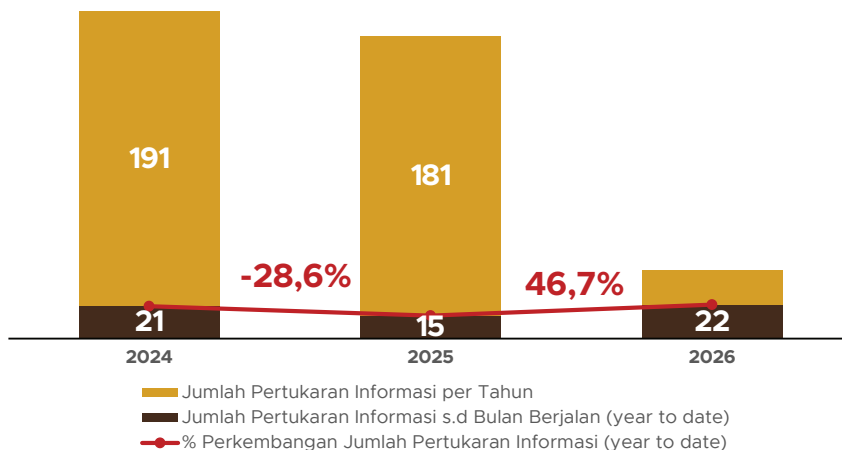
⬆️ 46,7%

Dibandingkan bulan Januari 2025 (y-to-y)

Tabel 45. Jumlah Pertukaran Informasi per Tahun Berdasarkan Jenisnya per Bulan

Jenis Pertukaran Informasi	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Outgoing Request	19	47	2	14	12	1	3	3	-	7	1	3	-	1	4
Incoming Request	107	85	9	4	4	12	11	-	6	11	5	10	8	5	14
Spontaneous Incoming	42	31	4	1	1	-	5	-	5	-	1	8	3	3	3
Spontaneous Outgoing	23	18	-	-	4	1	-	-	4	-	-	-	-	9	1
Total	191	181	15	19	21	14	19	3	15	18	7	21	11	18	22

Grafik 18. Perkembangan Jumlah Pertukaran Informasi Hingga Bulan Berjalan dalam 2 Tahun Terakhir (s.d Jan 2026)



Pasal 89 ayat (1) dan (2)

- (1) Kerja sama internasional dilakukan oleh PPATK dengan lembaga sejenis yang ada di negara lain dan lembaga internasional yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang.
- (2) Kerja sama internasional yang dilakukan PPATK dapat dilaksanakan dalam bentuk kerja sama formal atau berdasarkan bantuan timbal balik atau prinsip resiprositas.

Pasal 90 ayat (1)

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional

PUTUSAN PENGADILAN

Terkait TPPU dan TPPT
Januari 2026

Rekapitulasi berdasarkan tanggal putusan pada Website Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Terdapat **207** Perkara TPPU/TPPT yang telah diputus oleh Pengadilan Tahun 2024 - 2026 (s.d Januari 2026)



Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/TPPT Januari 2026
2 Putusan



Narkotika
19,8%



Penipuan
21,7%



Korupsi
16,9%



Penggelapan
13,0%



TP Lainnya
28,5%



Tabel 46. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Provinsi

Provinsi	2024	2025	2026 (s.d. Jan 2026)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aceh	1	5	-
Sumatera Utara	1	1	-
Sumatera Barat	2	-	-
Riau	-	1	-
Jambi	3	2	-
Sumatera Selatan	9	2	-
Bengkulu	-	-	-
Lampung	-	3	-
Kep. Bangka Belitung	-	-	-
Kep. Riau	1	7	-
DKI Jakarta	51	32	1
Jawa Barat	1	11	-
Jawa Tengah	-	5	1
DI Yogyakarta	-	2	-
Jawa Timur	12	1	-
Banten	2	2	-
Bali	1	-	-
Nusa Tenggara Barat	1	3	-
Nusa Tenggara Timur	-	1	-
Kalimantan Barat	2	3	-
Kalimantan Tengah	-	5	-
Kalimantan Selatan	2	-	-
Kalimantan Timur	1	13	-
Sulawesi Utara	3	1	-
Sulawesi Tengah	-	-	-
Sulawesi Selatan	5	4	-
Sulawesi Tenggara	1	-	-
Gorontalo	-	-	-
Sulawesi Barat	-	-	-
Maluku	1	-	-
Maluku Utara	-	-	-
Papua	-	-	-
Papua Barat	1	-	-
Papua Selatan	-	-	-
Papua Tengah	-	-	-
Papua Pegunungan	-	-	-
Papua Barat Daya	-	-	-
Total	101	104	2

Catatan:
Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2025



**UU No. 8
Tahun 2010**

Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, terdakwa wajib membuktikan bahwa Harta Kekayaannya bukan merupakan hasil tindak pidana.

Tabel 47. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Tindak Pidana Asal

Tindak Pidana Asal	2024	2025	2026 (s.d. Jan 2026)
(1)	(2)	(3)	(4)
Narkotika	17	24	-
Penipuan	23	22	-
Korupsi	21	14	-
Terorisme	1	6	-
ITE	9	14	-
Penggelapan	9	17	1
Perbankan	-	-	-
Transfer Dana	-	-	-
Pencurian	-	-	-
Pemalsuan Surat	9	1	-
Tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih	4	1	-
Penadahan	-	-	-
Bidang Perpajakan	-	-	-
Perjudian	-	4	1
Cukai	-	-	-
Kepabeanan	-	-	-
Perdagangan Orang	-	1	-
TPPU	8	-	-
Belum diketahui*	-	-	-
Total	101	104	2

Catatan:

Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2025

*Belum terdapat dokumen putusan pada *website* Direktori

Tabel 48. Jumlah Putusan Pengadilan terkait TPPU/ TPPT Berdasarkan Pasal UU TPPU/ TPPT

Pasal TPPU/ TPPT	2024	2025	2026 (s.d. Jan 2026)
(1)	(2)	(3)	(4)
UU No. 8 Tahun 2010	100	98	2
Pasal 3	80	84	2
Pasal 4	0	4	0
Pasal 5	20	10	0
UU No. 9 Tahun 2013	0	6	0
Pasal 5	0	4	0
Belum diketahui*	1	2	0
Total	101	104	2

Catatan:

Terdapat pengkinian data putusan Tahun 2025

*Belum terdapat dokumen putusan pada *website* Direktori

PPATK**NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

PKA

Pemberian Keterangan Ahli Januari 2026

Jumlah Pemberian Keterangan Ahli
pada bulan Januari 2026:

13 Pemberian
Keterangan Ahli

Pemberian
Keterangan Ahli
bulan ini

≈ -13,3%

Dibandingkan bulan
Des 2025 (*m-to-m*)

≈ -13,3%

Dibandingkan bulan
Jan 2025 (*y-on-y*)

53,8% ■
Kejaksaan

46,2% ■
Kepolisian

0,0% ■
Instansi
Lainnya



Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini paling banyak
pada tahap:

Persidangan

Pemberian Keterangan Ahli
bulan ini paling banyak terkait
jenis Tindak Pidana Asal:

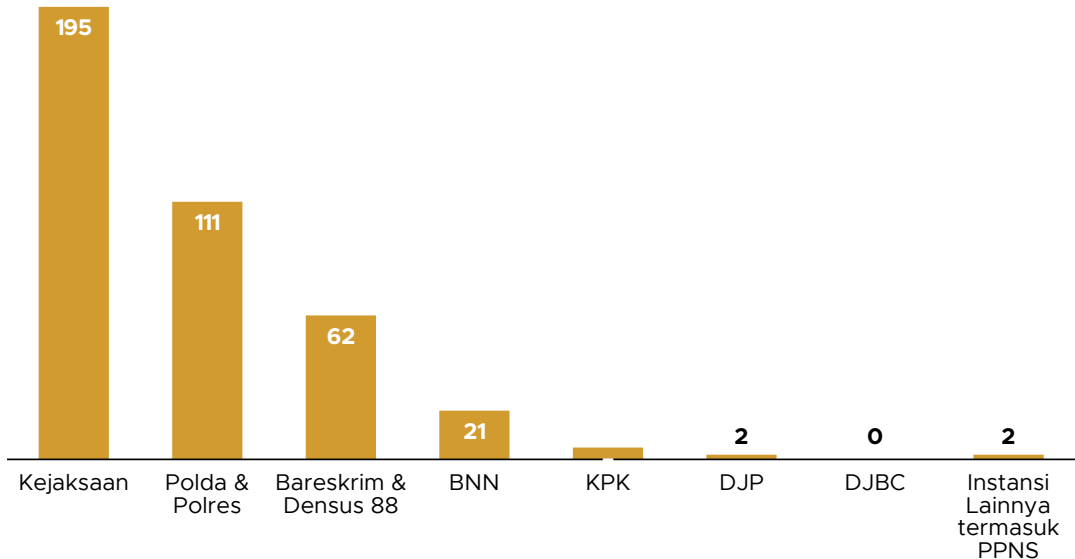
Narkotika



Tabel 49. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon

Instansi Pemohon	2024	2025	2026 (s.d. Jan)	2025												2026
				Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
Kejaksaan	83	105	7	10	7	10	4	9	12	9	12	11	7	7	7	7
Polda & Polres	54	53	4	3	2	3	4	5	3	5	5	6	8	6	3	4
Bareskrim & Densus 88	23	37	2	2	6	2	6	3	3	4	1	2	2	5	1	2
BNN	12	9	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	2	-	3	-
KPK	4	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DJP	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
DJBC	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Instansi Lain	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total	178	207	13	15	17	15	15	17	19	19	19	19	19	18	15	13

Grafik 19. Jumlah Pemenuhan Keterangan Ahli oleh PPATK Berdasarkan Instansi Pemohon Tahun 2024 - 2026 (sampai dengan Januari 2026)





PIHAK PELAPOR

Teregistrasi Aktif GoAML Januari 2026

Registrasi Baru & Penonaktifan
Januari 2026



69 Pihak Pelapor
Registrasi Baru



0 Pihak Pelapor
Penonaktifan

Jumlah Kumulatif Pihak Pelapor yang
Teregistrasi Aktif GoAML
Per Januari 2026

46.170 Pihak Pelapor

Distribusi Jumlah Kumulatif
Pihak Pelapor yang Teregistrasi
Aktif GoAML per Januari 2026



Penyedia Jasa Keuangan
Bank (PJK Bank)

3,7%



Penyedia Jasa Keuangan
Non-Bank (PJK Non Bank)

11,5%



Penyedia Barang
dan/atau Jasa (PBJ)

5,3%



Profesi

79,5%

Pihak Pelapor Bulan Ini

≈ **0,1%**

Dibandingkan Bulan
Desember 2025
(*m-to-m*)

≈ **8,3%**

Dibandingkan Bulan
Januari 2025
(*y-to-y*)

GoAML merupakan Sistem Informasi yang digunakan Pihak Pelapor untuk memenuhi kewajiban pelaporan kepada PPAATK antara lain:

LTKM: Semua pihak pelapor.

LTKL: PJK (Bank dan Non Bank).

LTKT: PJK (Bank dan Non Bank).

LT: PBJ dan Profesi.

Tabel 50. Jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML per bulan

Kelompok Industri	2025												2026
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
PJK Bank	1.806	1.811	1.628	1.633	1.634	1.637	1.696	1.707	1.710	1.719	1.720	1.722	1.724
Bank Umum	108	108	106	106	106	106	107	107	107	107	107	108	108
Bank Perkreditan Rakyat	1.698	1.703	1.522	1.527	1.528	1.531	1.589	1.600	1.603	1.612	1.613	1.614	1.616
PJK Non Bank	4.810	4.879	4.670	4.705	4.745	4.809	4.920	5.028	5.110	5.186	5.231	5.274	5.317
Perusahaan Pembiayaan	165	165	145	145	145	146	147	148	148	149	149	149	149
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	300	300	287	288	288	287	294	294	294	294	294	295	297
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	27	27	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26	26
Perusahaan Efek	136	137	131	131	131	131	131	131	132	133	133	133	133
Manajer Investasi	97	97	89	89	89	90	91	91	91	91	91	94	94
Kustodian	27	27	27	27	27	27	27	27	27	28	28	28	28
Wali Amanat	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Perposan Sebagai Penyedia Jasa Giro	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pedagang Valuta Asing	1.059	1.059	924	926	926	929	935	941	951	956	960	962	969
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara E-Money dan/ atau E-Wallet	60	60	60	60	60	60	61	62	62	63	63	64	64
Koperasi yang Melakukan Kegiatan Simpan Pinjam	2.146	2.212	2.229	2.249	2.286	2.342	2.422	2.517	2.581	2.642	2.680	2.713	2.736
Pegadaian	141	141	141	142	142	142	148	148	152	153	153	153	154
Perusahaan yang bergerak di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi	93	94	80	80	80	80	81	82	83	85	85	86	89
Pedagang Aset Kripto	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
Penyelenggara Kegiatan Usaha Pengiriman Uang	235	236	221	221	221	224	230	232	233	235	238	238	238
Perusahaan Modal Ventura	56	56	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53	53
Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur	3	3	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2



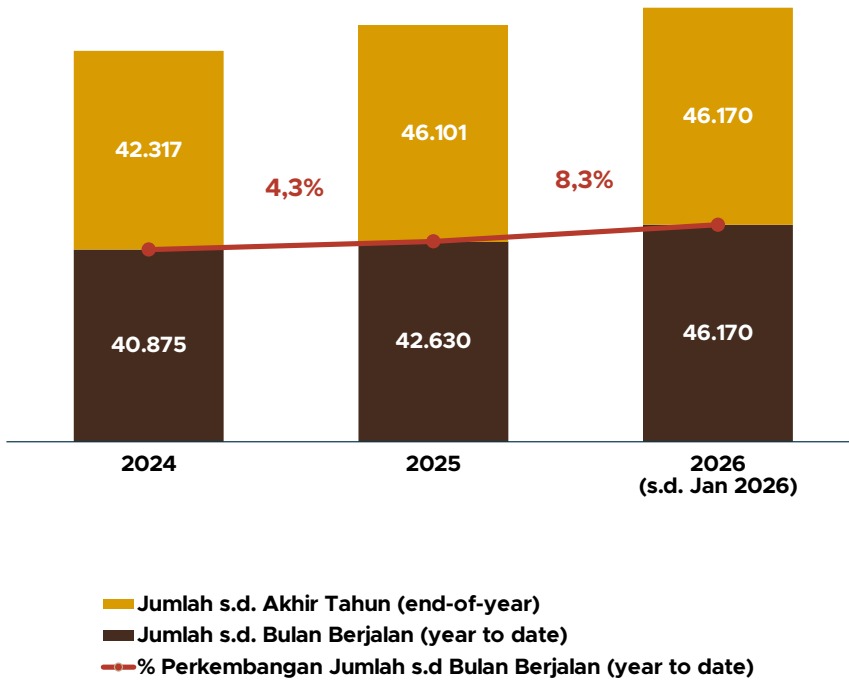
Pasal 1 ayat (11)

Pihak Pelapor adalah Setiap Orang yang menurut Undang-Undang ini wajib menyampaikan laporan kepada PPAK

**UU No. 8
Tahun 2010**

Kelompok Industri	2025												2026
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Lembaga Keuangan Mikro	97	97	95	106	106	106	106	106	107	108	108	108	109
Lembaga Pembiayaan Ekspor	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi	100	100	93	93	93	93	95	96	96	96	96	96	97
Penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	7	7	7	7	10	11	11	12	12	12	12	14	18
Penyelenggara layanan urun dana melalui penawaran saham berbasis teknologi	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
Pedagang Emas Fisik Digital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembiayaan Perumahan Sekunder	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
PBJ	2.224	2.246	2.258	2.269	2.293	2.308	2.332	2.373	2.391	2.410	2.453	2.457	2.468
Perusahaan Properti/ Agen Properti	1.353	1.364	1.372	1.376	1.385	1.395	1.410	1.436	1.448	1.460	1.493	1.497	1.503
Pedagang -Kendaraan Bermotor	469	479	481	488	503	508	517	532	537	542	550	550	555
Pedagang Permata dan Perhiasan/ Logam Mulia	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
Pedagang Barang Seni dan Antik	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3
Balai Lelang	112	112	112	112	112	112	112	112	113	115	116	116	116
Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71	71
Pejabat Lelang Kelas II	185	186	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188	188
Profesi	33.790	33.899	33.996	34.436	35.678	36.264	36.441	36.512	36.535	36.609	36.625	36.648	36.661
Notaris	21.514	21.598	21.688	22.119	23.339	23.902	23.988	24.006	24.015	24.028	24.036	24.042	24.043
Pejabat Pembuat Akta Tanah	10.823	10.826	10.826	10.826	10.828	10.830	10.832	10.833	10.835	10.836	10.836	10.836	10.837
Akuntan	450	451	451	452	453	453	456	456	457	458	458	459	460
Akuntan Publik	484	484	483	486	486	493	496	507	510	511	512	513	514
Perencana Keuangan	46	46	46	46	46	46	46	46	46	68	68	68	68
Advokat	473	494	502	507	526	540	623	664	672	708	715	730	739
Total	42.630	42.835	42.552	43.043	44.350	45.018	45.389	45.620	45.746	45.924	46.029	46.101	46.170

Grafik 20. Perkembangan jumlah kumulatif pihak pelapor yang teregistrasi aktif pada aplikasi GoAML pada posisi bulan berjalan dan akhir tahun, Dalam 2 Tahun Terakhir





AUDIT

Kepatuhan Terhadap Pihak Pelapor Januari 2026

PPATK berwenang melakukan kegiatan Audit Kepatuhan dan Audit Khusus terhadap Pihak Pelapor, baik secara off-site maupun secara on-site kepada Pihak Pelapor (UU Nomor 08 Tahun 2010 Pasal 43)

Audit Kepatuhan Terhadap Pihak Pelapor pada Januari 2026

1 Pihak Pelapor

Jumlah Akumulasi Audit Sejak 2005

1.907 Audit

Jumlah Audit

Penyedia Jasa Keuangan

0



Profesi

0



Penyedia Barang dan Jasa

1



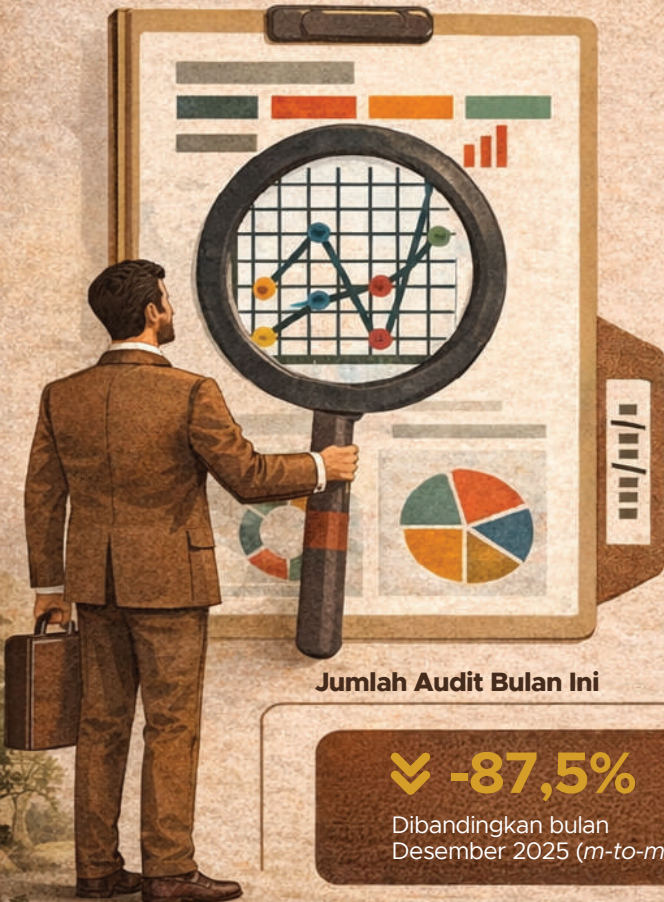
Jumlah Audit Bulan Ini

∨ -87,5%

Dibandingkan bulan Desember 2025 (*m-to-m*)

∧ 0,0%

Dibandingkan bulan Januari 2025 (*y-on-y*)



Tabel 51. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit*) Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor per Bulan

Jenis Pihak Pelapor	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
PJK Bank	7	8	1	-	-	-	-	-	-	2	1	1	1	2	-
PJK Non Bank	18	45	-	2	3	2	5	5	3	8	6	3	4	4	-
Perusahaan Pembiayaan	-	4	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi	-	2	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan Efek	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Manajer Investasi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-
Pasar Modal**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kustodian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wali Amanat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	-	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Valuta Asing	5	7	-	2	-	-	-	2	1	2	-	-	-	-	-
Penyelenggara Alat Pembayaran Menggunakan Kartu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	7	7	-	-	1	-	-	2	-	1	2	-	1	-	-
Pegadaian	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	2	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	3	5	-	-	1	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-
Perusahaan modal ventura	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Perusahaan pembiayaan infrastruktur	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga keuangan mikro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lembaga pembiayaan ekspor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pedagang Aset Kripto	-	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	-	-
Penyelenggara Layanan Transaksi Keuangan Berbasis Teknologi Informasi	-	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-

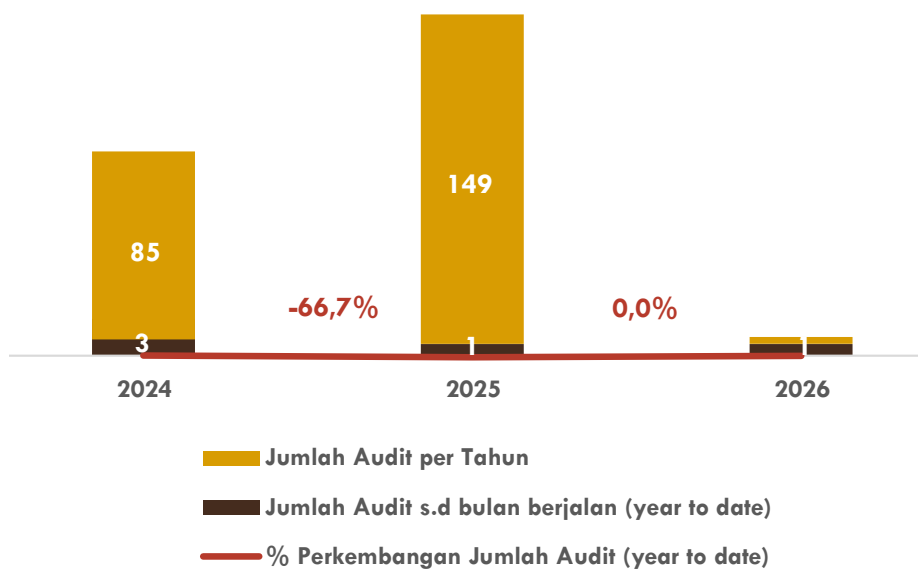
Perusahaan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi	-	2	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
PBJ	50	84	-	10	2	3	6	13	12	10	12	2	10	4	1
Perusahaan Properti	30	42	-	7	1	2	-	8	7	2	9	2	2	2	1
Pedagang Kendaraan Bermotor	17	36	-	3	1	1	2	5	5	8	3	-	6	2	-
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	2	4	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	-	-	-
Balai Lelang	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-
Barang Seni/Antik	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Profesi	10	12	-	2	1	-	2	2	-	1	-	1	3	-	-
Total	85	149	1	14	6	5	13	20	17	20	19	7	19	8	1

Catatan:

*) Mencakup audit kepatuhan onsite dan audit khusus/join audit

**) Kelompok Industri Pasar Modal hanya tersedia pada sistem GRIPS (hingga Januari 2021) dan akan diklasifikasikan sesuai klasifikasi pada sistem pelaporan GoAML.

Grafik 21. Perkembangan Jumlah Kumulatif Audit dalam 2 Tahun Terakhir s.d Januari 2026



Grafik 22. Jumlah Pihak Pelapor yang telah di Audit Berdasarkan Jenis Pihak Pelapor Tahun 2024-2026 (s.d Januari 2026)

Perusahaan Properti	1
Pedagang Kendaraan Bermotor	0
Profesi	0
Bank	0
Koperasi yang melakukan kegiatan simpan pinjam	0
Pedagang Valuta Asing	0
Penyelenggara kegiatan usaha pengiriman uang	0
Perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan berjangka komoditi	0
Pedagang Perhiasan/Logam Mulia	0
Perposan sebagai penyelenggara jasa giro	0
Balai Lelang	0
Perusahaan Pembiayaan	0
Penyelenggara e-money dan/atau e-wallet	0
Pedagang Aset Kripto	0
Dana Pensiun Lembaga Keuangan	0
Perusahaan Efek	0
Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Pialang Asuransi penyelenggara layanan transaksi keuangan berbasis teknologi informasi	0
Perusahaan urun dana berbasis teknologi informasi	0
Manajer Investasi	0



**UU No. 8
Tahun 2010**

Pasal 43

Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kepatuhan Pihak Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, PPATK berwenang:

- c. melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
- d. menyampaikan informasi dari hasil audit kepada lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap Pihak Pelapor;"



DOKUMEN KERJA SAMA

Januari 2026

Jumlah penandatanganan dokumen kerja sama antara PPAK dengan FIU/Instansi

2 Dokumen Kerjasama



Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPAK yang Masih Berlaku s.d. Tahun 2026

Dokumen Kerja Sama Instansi Dalam Negeri

93

Dokumen Kerja Sama FIU Negara Lain

63

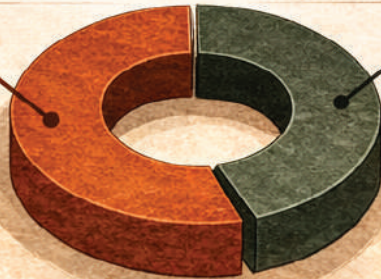
Presentase MoU yang ditandatangani antara PPAK dengan FIU atau Lembaga pada Tahun 2024 - 2026 (s.d. Januari 2026)

Domestik Instansi/Lembaga

53,3%

Internasional FIU Negara Lain

46,7%



Tabel 52. Jumlah Dokumen Kerja Sama Internasional dan Domestik Berdasarkan Bulan Penandatanganan Tahun 2025 - 2026 (s.d. Januari 2026)

FIU/Instansi	2025												2026
	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
Internasional (FIU Negara Lain)													
MoU	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-
Nasional (K/L, Lembaga Pendidikan, Pihak Pelapor)													
MoU	1	2	2	1	-	-	1	2	2	2	1	-	1
PKS	-	1	-	-	-	-	-	1	-	2	2	-	1
Total	1	3	2	1	-	-	2	3	2	4	3	1	2

Tabel 53. Jumlah Kumulatif Dokumen Kerja Sama PPATK yang Masih Berlaku per Januari 2026 Berdasarkan Jenis Dokumen Kerja Sama

Jenis Lembaga	Jumlah Dokumen Kerja Sama	
	MoU	PKS
(1)	(2)	(3)
FIU Negara Lain	63	-
Kementerian/Lembaga	55	20
Lembaga Pendidikan	16	1
Pihak Pelapor	1	-
Total	135	21



UU No. 8 Tahun 2010

Pasal 90 Ayat 1

Dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK dapat melakukan kerja sama pertukaran informasi berupa permintaan, pemberian, dan penerimaan informasi dengan pihak, baik dalam lingkup nasional maupun internasional:

- Instansi penegak hukum;
- Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyedia jasa keuangan;
- Lembaga yang bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- Lembaga lain yang terkait dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang atau tindak pidana lain terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang; dan
- Financial intelligence unit negara lain.



KONTRIBUSI INDONESIA SEBAGAI ANGGOTA FATF

— Januari 2026 —

Jumlah Akumulasi Partisipasi Indonesia
dalam Pelatihan FATF dan FSRB Sejak 2024

42 Peserta

Jumlah Akumulasi Technical Assistance dari
PPATK ke Negara Lain Sejak 2019

13 Technical Assistance

Jumlah Akumulasi Kontribusi Tenaga Ahli
Indonesia untuk FATF dan FSRB Sejak 2023

18 Kontribusi

Kontribusi Indonesia Sebagai Anggota FATF meliputi:

- Keikutsertaan Indonesia dalam kegiatan pelatihan atau capacity building yang diselenggarakan oleh FATF maupun FSRB
- Pemberian bantuan teknis, kelembagaan, dan peningkatan kapasitas yang diberikan secara resmi oleh PPATK kepada otoritas mitra
- Mendukung pekerjaan teknis dalam tahapan evaluasi, pemantauan, dan penilaian kepatuhan negara terhadap standar FATF

FATF: Financial Action Task Force

FSRB: FATF-Style Regional Bodies

Tabel 54. Jumlah Partisipasi Indonesia dalam Pelatihan FATF dan FSRB Berdasarkan Jenis Pelatihan dan Instansinya Tahun 2024 - 2026 (s.d. Januari 2026)*)

Jenis Pelatihan	Instansi	Jumlah Peserta Pelatihan			Total
		2024	2025	2026 (s.d. Jan 2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
FATF Standard Training Course (STC)					
Standard Training Course STC	BI	-	1	-	1
	BNPT	-	1	-	1
	Kejaksaan Agung	-	2	-	2
	Kementerian Hukum	-	1	-	1
	Kementerian Keuangan	-	1	-	1
	Kementerian Luar Negeri	-	1	-	1
	KPK	-	1	-	1
	OJK	2	1	-	3
	Polri	-	1	-	1
	PPATK	-	4	-	4
Beneficial Ownership focused STC	PPATK	-	1	-	1
Terrorist Financing focused STC	PPATK	-	1	-	1
Law Enforcement Framework STC	Kejaksaan Agung	1	-	-	1
	Kementerian Keuangan	1	-	-	1
FATF Joint Assessor Training					
Joint Assessor Training	Kementerian Keuangan	-	1	-	1
	OJK	-	2	-	2
	PPATK	2	1	-	3
5th Round Joint Assessor Training	OJK	1	-	-	1
Virtual Joint Update Joint Assessor Training	PPATK	2	-	-	2
Virtual New Round Update Joint Assessor Training	PPATK	-	1	-	1
ICRG Reviewer Training					
ICRG Reviewer Training	PPATK	4	2	-	6
APG Assessor Training					
APG Assessor Training	OJK	-	1	-	1
	PPATK	-	1	-	1
APG 4th Round Assessor Training	OJK	1	-	-	1
APG 5th Round Assessor Training	PPATK	2	-	-	2
Update Assessor Training					
Update Assessor Training	PPATK	-	1	-	1
Total		16	26	-	42

Catatan:

*) Indonesia secara proaktif mengajukan usulan calon peserta namun usulan tidak selalu diterima FATF Secretariat

Tabel 55. Jumlah Technical Assistance (TA) dari PPATK ke Negara Lain Berdasarkan Negara dan Ruang Lingkup TA Tahun 2024 - 2026 (s.d. Januari 2026)

Negara	Ruang Lingkup TA	Jumlah TA			Total
		2024	2025	2026 (s.d. Jan 2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bhutan	Pelaksanaan ECOFEL (Egmont Centre of FIU Excellence and Leadership) Secondment Program	-	1	-	1
Laos	Penguatan Rezim APU PPT	1	-	-	1
Nigeria	Pengembangan analisis strategis, kerjasama pelatihan, dan pengawasan kepatuhan	-	1	-	1
Papua Nugini	Tindak lanjut temuan MER Papua Nugini dan persiapan proses ICRG	-	1	-	1
Timor Leste	Pengembangan aplikasi SINTRAF (Sistema Informático para Análise de Transações Financeiras)	1	-	-	1
Vietnam	Tindak lanjut ICRG Action Plan	-	1	1	2
Total		2	4	1	7

Tabel 56. Jumlah Tenaga Ahli Indonesia dalam Mendukung Pekerjaan Teknis Negara Terhadap Standar FATF dan FSRB Berdasarkan Fokus dan Instansinya Tahun 2024 - 2026 (s.d. Januari 2026)

Fokus	Instansi	Jumlah Tenaga Ahli			Total
		2024	2025	2026 (s.d. Jan 2026)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
IO.5	PPATK	1	-	-	1
IO.9	PPATK	1	-	-	1
FIU	PPATK	2	-	-	2
IO.6	PPATK	1	-	-	1
IO.2	PPATK	1	-	-	1
IO.6	PPATK	1	-	-	1
R.7	PPATK	1	-	-	1
R.38	PPATK	1	-	-	1
Legal	PPATK	-	1	-	1
IO.2	PPATK	-	1	-	1
Financial	PPATK	-	1	-	1
Financial	OJK	-	1	-	1
R.15	OJK	-	1	-	1
FIU	PPATK	-	-	1	1
Total		9	5	1	15

PPATK**NOW**

NOBLE - OPTIMISTIC - WONDROUS
INTEGRITAS - KAPABILITAS - KOMITMEN - SINERGI

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme

Januari 2026

PPATK melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) dalam rangka meningkatkan kapabilitas pemangku kepentingan untuk mendukung terwujudnya efektivitas pencegahan dan pemberantasan TPPU TPPT.

Mayoritas Peserta Pelatihan Berdasarkan
Asal provinsi Instansi Peserta 2026

69,0%
DKI Jakarta

Pelaksanaan Diklat bulan ini

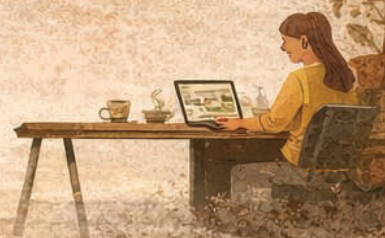
2 Penyelenggaraan
Pendidikan dan Pelatihan

42 Peserta
Pendidikan dan
Pelatihan

⬆️ 0,0% | ⬆️ 0,0%

Dibandingkan bulan
Desember 2025
(m-to-m)

Dibandingkan bulan
Januari 2025
(y-on-y)



Tabel 57. Jumlah Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	17	23	-	2	-	2	5	4	3	2	1	2	2	-	-
Pihak Pelapor	24	32	1	6	4	3	2	4	3	1	3	3	2	-	1
Lembaga Pengawas Pengatur	2	3	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	1	-	-
Internal PPATK	4	12	1	-	-	-	-	1	1	2	1	3	3	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
Total	47	70	2	8	4	6	7	10	7	5	5	8	8	-	2

Tabel 58. Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan per Bulan

Pemangku Kepentingan	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Penegak Hukum	662	787	-	85	-	93	159	115	121	103	29	40	42	-	-
Pihak Pelapor	.067	1.863	30	285	276	173	113	232	201	65	97	226	165	-	29
Lembaga Pengawas Pengatur	87	99	-	-	-	50	-	24	-	-	-	-	25	-	-
Internal PPATK	119	299	20	-	-	-	-	24	21	69	25	74	66	-	-
Lainnya	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
Total	1.935	3.048	50	370	276	316	272	395	343	237	151	340	298	-	42

Tabel 59. Penyelenggaraan Pelatihan Berdasarkan Jenis Pemangku Kepentingan Tahun 2024 - 2026 (s.d Jan 2026)

Pemangku Kepentingan	2024		2025		2026 (s.d. Jan 2026)	
	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta	Diklat	Peserta
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegak Hukum	17	662	23	787	-	-
Pihak Pelapor	24	1.067	32	1.863	1	29
Lembaga Pengawas Pengatur	2	87	3	99	-	-
Internal PPATK	4	119	12	299	-	-
Lainnya	-	-	-	-	1	13
Total	47	1.935	70	3.048	2	42

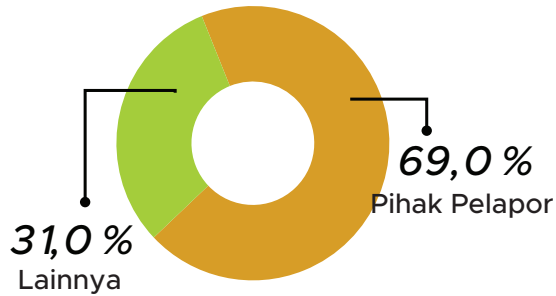


**UU No. 8
Tahun 2010**

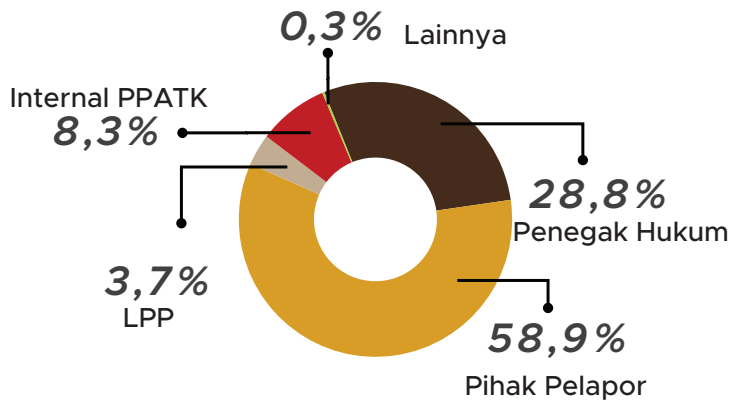
Pasal 40

a. Dalam melaksanakan fungsi pencegahan dan pemberantasan tindak pidana Pencucian Uang, PPATK berwenang (f) menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan anti pencucian uang.

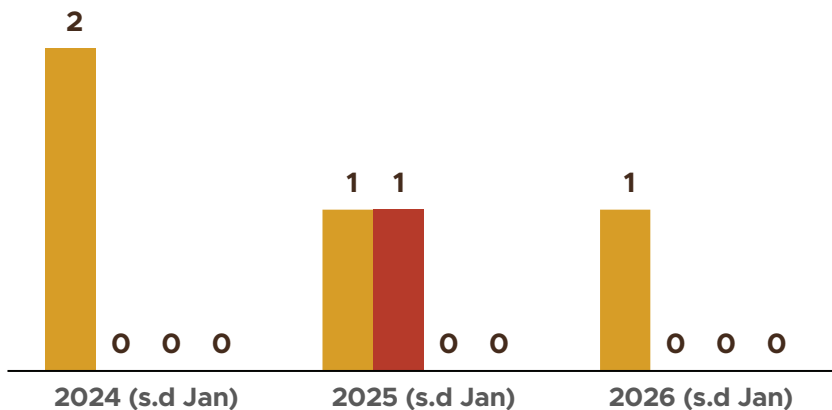
Grafik 23. Persentase Peserta Pelatihan APUPPT Periode Januari 2026



Grafik 24. Persentase Peserta Pelatihan APUPPT Periode Januari 2024 - Januari 2026



Grafik 25. Jumlah Pelaksanaan Pelatihan APUPPT Periode Januari 2024 - Januari 2026



Tabel 60. Jumlah Jumlah Peserta Pelatihan Berdasarkan Asal Provinsi Instansi Peserta

Wilayah	2024	2025	2026 s.d Jan
(1)	(2)	(3)	(16)
Aceh	36	22	-
Sumatera Utara	61	68	-
Sumatera Barat	23	10	-
Sumatera Selatan	81	24	-
Bengkulu	11	5	-
Jambi	12	5	-
Riau	73	34	-
Kepulauan Riau	29	11	-
Lampung	19	16	-
Kep Bangka Belitung	5	8	-
Banten	80	160	-
DKI Jakarta	577	1.296	29
Jawa Barat	263	677	-
Jawa Tengah	107	185	-
Jawa Timur	92	180	-
DI Yogyakarta	39	15	-
Bali	68	32	-
Nusa Tenggara Barat	20	38	-
Nusa Tenggara Timur	6	40	-
Maluku	5	4	-
Maluku Utara	3	6	-
Kalimantan Barat	55	22	-
Kalimantan Timur	27	25	-
Kalimantan Tengah	8	2	-
Kalimantan Selatan	40	8	-
Kalimantan Utara	3	7	-
Sulawesi Utara	8	21	-
Sulawesi Selatan	135	55	-
Sulawesi Tengah	11	13	-
Sulawesi Tenggara	16	20	-
Sulawesi Barat	4	4	-
Gorontalo	4	6	-
Papua	10	15	-
Papua Barat	2	5	-
Papua Tengah	1	2	-
Papua Selatan	-	2	-
Papua Pegunungan	-	-	-
Papua Barat Daya	1	5	-
Lain-Lain	-	-	13
Total	1.935	3.048	42



DUMAS

Pengaduan Masyarakat Januari 2026



PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana Pencucian Uang dan tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana Pencucian Uang.
(Pasal 2 Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2019)



18 Pengaduan
dari masyarakat

↑ 28,6%

Dibandingkan bulan
Desember 2025 (*m-to-m*)



7 Pengaduan
dari Lembaga

↓ -56,3%

Dibandingkan bulan
Desember 2025 (*m-to-m*)



Pengaduan Masyarakat bulan ini

↓ -16,7% Dibandingkan
Desember 2025 (*m-to-m*)

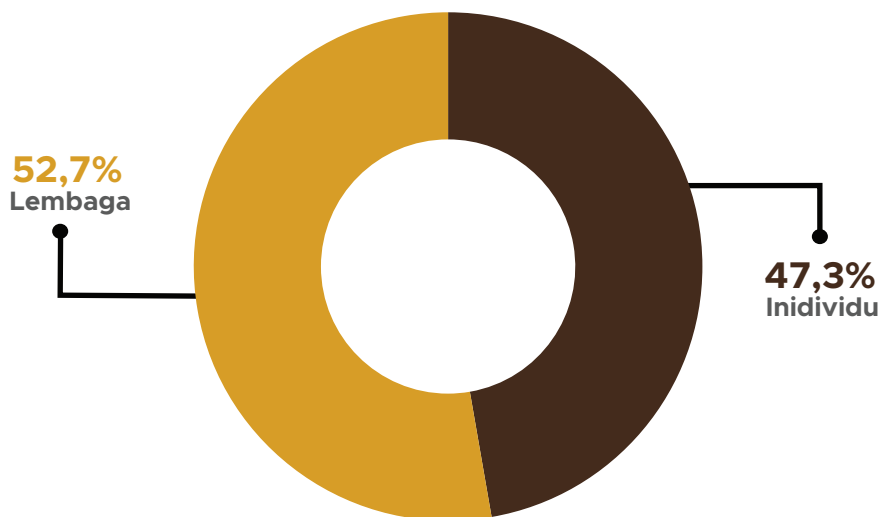
↑ 78,6% Dibandingkan
Januari 2025
(*y-to-y*)



Tabel 61. Jumlah Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK per Bulan

Jenis Pelapor	2024	2025	2025												2026
			Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Jan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Individu	96	119	6	4	13	10	10	11	5	12	10	14	10	14	18
Lembaga	119	134	8	14	7	5	8	6	8	11	19	15	17	16	7
Total	215	253	14	18	20	15	18	17	13	23	29	29	27	30	25

Grafik 26. Distribusi Pengaduan Masyarakat yang Disampaikan kepada PPATK berdasarkan Jenis Pelapor 2024 s.d Januari 2026



**Perka PPATK
No. 7 Tahun 2019**

Pasal 2

PPATK dapat menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain yang terkait dengan tindak pidana pencucian uang

BULETIN STATISTIK



PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN

Jl. Ir. H. Juanda No. 35 Jakarta 10120

Telp. (021) 50928484

Homepage: <https://www.ppatk.go.id>

ISSN 2986-0849

